



KOPERASI INDONESIA

Dr. MUHLIS RUSLAN, SE., M.Si

IMPLIKASI KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI

(TINJAUAN KOPERASI MASYARAKAT PESISIR)

**IMPLIKASI KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI
(Tinjauan Koperasi Masyarakat Pesisir)**

Penulis : Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si
Editor : Mas'ud Muhammadiyah | Abdul Kodir
Desain Cover : Jufriadi, ST., M.SP

Diterbitkan Pertama Kali Oleh :

Azkiya Publishing

Prum Bukit Golp Arcadia Housing F6 No 10

Leuwinanggung Gunung Putri Bogor

Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP

Sastra UNIBOS

Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ

Nyutran MG II 14020 Yogyakarta

Pustaka.aq@gmail.com

HP 0895603733059

ISBN : 978-602-5447-77-8

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotocopy, scan, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis.

15x23 cm

Sanksi pelanggaran pasal 44, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Motivasi

Orang Sukses Takkan Pernah Mengeluh dan Senantiasa Berusaha Bagaimana untuk Berhasil.

Orang Yang Berhenti Membaca, Belajar, dan Tidak Mencari Pengalaman ... Tak akan Pernah Memiliki Masa Depan

Muhlis Ruslan.

muhlisruslan@universitasbosowa.ac.id

SAMBUTAN REKTOR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini yang berjudul: “Kinerja Kelembagaan Koperasi (Tinjauan Model Koperasi Masyarakat

Pesisir)” dapat diselesaikan. (edisi revisi).

Buku ini menghasilkan suatu model teoritis tentang sehat organisasi, sehat usaha, sehat *financial*, kompetensi sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, buku ini dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara teori oleh karena dapat menggeneralisasi variabel kinerja lembaga koperasi.

Model teoritik dalam menunjang kinerja lembaga menunjukkan bahwa sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha, dan kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi indikator dalam membentuk kinerja kelembagaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Sebagai Rektor Universitas Bosowa selalu mendorong para dosen untuk senantiasa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya membuat karya ilmiah, seperti buku dan jurnal. Harapan saya agar buku ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Ekonomi Koperasi.

Semoga karya Dr.Muhlis Ruslan, SE.,M.Si ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami kinerja koperasi dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengelola koperasi.

Makassar, 2018
Rektor Universitas Bosowa,

Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng

PENGANTAR PENULIS



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga buku edisi revisi ini dapat diselesaikan.

Kehadiran buku ini merupakan wujud dari penelitian yang penulis lakukan pada koperasi wilayah pesisir, khususnya di Sulawesi Selatan dan diperkuat dengan telaah pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul buku ini.

Buku ini membahas tentang Kinerja Lembaga Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi (Tinjauan Model Koperasi Pada Wilayah Pesisir). Dalam pembahasan ini, dijelaskan tentang sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha, kompetensi Sumber Daya Manusia, dan kesejahteraan koperasi. Namun buku ini masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang variabel-variabel lain yang dapat membentuk kinerja kelembagaan koperasi, termasuk memasukkan faktor-faktor ekonomi dan variabel lain yang diduga berkontribusi terhadap ukuran

kinerja koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Penulis menyadari bahwa setiap karya dan usaha yang dilakukan oleh penulis, tentu saja masih mengandung keterbatasan dan kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu saran, kritik, dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa yang akan datang. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 2018

Penulis,

Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Motivasi	3
Sambutan Rektor Universitas Bosowa	4
Pengantar Penulis	6
Daftar Isi	8
BAB I : PENDAHULUAN	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	24
1. Arti Lambang Koperasi	24
2. Pengertian Koperasi	28
3. Tentang Perkoperasian	31
4. Kelembagaan Ekonomi	34
5. Pengelolaan Koperasi	61
1. Sehat Organisasi	62
2. Sehat Usaha	67
3. Sehat Finacial	72
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia	75
5. Kinerja Kelembagaan	84
6. Kesejahtraan Anggota	88

BAB III : KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI PESISIR .	
1. Aspek Organisasi	97
2. Aspek Sumber Daya Manusia	100
3. Aspek Keuangan	103
4. Aspek Kelembagaan	106
BAB IV : MODEL KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI PESISIR	112
1. Deskriptif Sehat Organisasi	112
2. Deskriptif Variabel Sehat Financial	117
3. Deskriptif Sehat Usaha	120
4. Deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia ..	124
5. Analisis Deskriptif Kinerja Koperasi	128
6. Analisis Deskriptif Kesejahteraan Anggota	132
BAB V : IMPLIKASI KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI WILAYAH PESISIR	137
1. Implikasi Organisasi	137
2. Implikasi Financial	138
3. Implikasi sehat Usaha	140
4. Implikasi Kompetensi SDM	143
5. Implikasi Kinerja Kelembagaan	145
6. Implikasi Kesejahteraan Anggota Koperasi	147
CATATAN PENTING	174
A. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain .	174
B. Kelebihan Koperasi Dibandingkan Perusahaan	

Lain	175
C. Fungsi dan Peranan Koperasi Untuk Masyarakat	176
D. Beberapa Masyarakat Kurang Memanfaatkan Koperasi	176
DAFTAR PUSTAKA	181

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga koperasi merupakan salah satu unit ekonomi yang banyak mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Keberadaan lembaga koperasi telah banyak berperan di dalam pembangunan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mampu menyatukan masyarakat. Dasar hukum keberadaannya di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal itu sejalan dengan pasal 1 UU No.25/1992 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan UU No.25/1992

tentang perkoperasian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada bidang ekonomi, peranan koperasi sangat terasa dalam pembangunan nasional karena koperasi banyak berperan dalam membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya, membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian

nasional. (Wikipedia, 2014). Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa koperasi memberikan kontribusinyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional yakni; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. Menteri Koperasi dan UKM menegaskan ada tiga faktor yang harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing. Ketiga faktor tersebut adalah peningkatan sumber daya manusia, akses pembiayaan murah dan kualitas produksi.

Di usia koperasi yang ke 69 tahun 2016, banyak koperasi yang telah maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi-koperasi tersebut memberikan kontribusinyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Kitapun juga menyadari, masih banyak koperasi yang belum berhasil, memiliki permasalahan intern, kesulitan permodalan dan persoalan organisasional lainnya. Masih banyak pula anggapan negatif, pandangan pesimis sebagian masyarakat

terhadap peran dan fungsi koperasi. Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Rehabilitasi merupakan langkah pembaharuan koperasi diawali dengan pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi, melalui Online Database System (ODS), dengan membekukan/membubarkan koperasi yang tidak aktif. Juga dilakukan penertiban koperasi melalui pengawasan terpadu dengan membentuk Deputi Pengawasan.

Berdasarkan data yang terhimpun, jumlah koperasi di Indonesia sampai akhir tahun 2015 menyentuh angka 212.135 unit. Namun berdasarkan pendataan, koperasi yang aktif hanya 150.223 unit. Jumlah tersebut didapatkan melalui pemuktahiran data koperasi yang dilakukan dengan Online Database System. Reorientasi, yaitu upaya sistematis untuk merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah: Membangun Koperasi Berbasis Informasi Teknologi (IT); Melalui kerjasama dengan Notaris sudah dapat dilakukan penerbitan akte koperasi secara online. Proses pendirian koperasi semakin mudah, cepat, dan efisien. Koperasi juga

difasilitasi untuk melakukan RAT secara Online. Demikian juga proses Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dalam reorientasi juga dilakukan penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota koperasi. Pengembangan, merupakan agenda permanen yang meliputi upaya: mengkaji regulasi yang menghambat berkembang koperasi; memperkuat akses pembiayaan, dengan menyiapkan koperasi untuk menjadi penyalur KUR; Selanjutnya dikembangkan koperasi sektor riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi. Gerakan dan kesadaran untuk reformasi total tersebut, tidak harus berupa kegiatan yang seragam dan monoton namun hendaknya bersifat serentak, dengan dukungan komitmen dan kerjasama semua pihak yang meliputi pemerintah, dunia usaha, lingkungan akademisi serta seluruh komponen masyarakat. Pemerintah akan terus hadir dan berkomitmen untuk membangun koperasi melalui berbagai kebijakan dan program, dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran, manajemen dan teknologi informasi. Puspayoga (2016).

**Data Kementerian Koperasi dan UKM (2015).
Pertumbuhan koperasi di Indonesia pada tahun 2014,
tercatat sebanyak 209.488 unit, aktif 147.249 unit, tidak**

aktif 62.239 dan jumlah anggota sebanyak 36.443.953. Tahun 2015 meningkat menjadi 212.135 unit, aktif 150.223, tidak aktif sebanyak 61.912 dan jumlah anggotanya sebanyak 37.783.160. Meningkatnya jumlah koperasi, berimplikasi positif pada jumlah anggotanya. Dari total **212.135 unit** koperasi yang ada di Indonesia, sebanyak 8.675 unit berada di Sulawesi Selatan. Angka tersebut menempatkan daerah Sulawesi Selatan sebagai wilayah urutan ke-5 jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Urutan pertama Jawa Timur sebanyak 31.182 unit, ke-dua Jawa Tengah 28.227 unit, ke-tiga Jawa Barat 25.741 unit, dan ke-empat Sumatera Utara 11.696 unit. Sektor ini diyakini mampu mendorong perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu pemerintah terus memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Kelembagaan koperasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya pada tiga wilayah daerah pesisir Kabupaten/Kota, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM (BPS Makassar Dalam Angka, 2015), bahwa Kota Makassar mempunyai 14 Kecamatan memiliki sejumlah 795 unit koperasi yang masih aktif dengan jumlah anggota 3.344 orang, Kabupaten Pangkep memiliki 13 Kecamatan dan terdapat 15 unit koperasi dengan jumlah

anggota 2.901 orang (BPS Pangkep Dalam Angka, 2015) dan Kabupaten Takalar memiliki 9 Kecamatan dan terdapat 333 unit koperasi dengan jumlah anggota 26.265 orang (BPS Takalar Dalam Angka, 2015).

Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menjadikan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar perekonomian Sulsel jelang 2018. Membangun Sulsel ternyata tak cukup dengan modal sumberdaya tersebut tapi butuh syarat lain; yaitu kekuatan pilar norma (sosial) yang mengayomi serta organisasi (ekonomi) yang mumpuni. Pilar aturan yang dibingkai dalam satu organisasi berbasis ekonomi kerakyatan. Lalu di manakah pilar itu bisa diwujudkan sebagai basis penggerak kemajuan Sulsel. Sulsel sesungguhnya masuk ke dalam provinsi yang dikategorikan berkembang pencapaian koperasinya bersama tujuh provinsi lain, Sumbar, Yogyakarta, Bali, NTB, Gorontalo, Sultra, sayangnya, ini berbarengan jumlah koperasi yang jeblok atau tidak aktif. BPS mencatat bahwa pada rentang 2006 hingga 2014 jumlah koperasi yang ada di Sulawesi Selatan sangat besar namun tak banyak yang tak sehat. Pada tahun 2006 terdapat 4.761 yang aktif dari puluhan ribu yang ada, tahun 2007 sebanyak 5.252, tahun 2008 ada 5.327 dan di tahun 2014 justru menurun menjadi 5.051. Hingga 2015, tak kurang dari 7.700 koperasi yang telah terdaftar. Namun, ada sekitar 2.000 koperasi mulai

limbung atau tidak aktif. Menurunnya kinerja koperasi disebabkan oleh beberapa faktor eksternal. Di antaranya, kompetisi dengan bank, leasing, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya. Kedua, tidak membuminya semangat berkoperasi, yang terjadi adalah warga diminta berkoperasi karena iming bantuan pemerintah. Koperasi diusung melalui proyek atau agenda pihak luar. Ketiga, kapasitas pengurus yang tak mampu mengelola kompleksitas anggota, dengan kata lain, pengelola sulit beradaptasi atas perubahan eksternalnya. Mereka punya visi tetapi tak sadar kalau mereka tak punya kapasitas merealisasi-kannya. Pemerintah yang diharapkan sebagai penolong malah menjerumuskan ke dalam ketergantungan sistemik, ketergantungan yang diskenariokan sebagai proyek tahunan, atau bantuan berbasis APBD/APBN. Muaranya pemberdayaan semu. AM Yamin 2013.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir, yakni keterbatasan akses informasi, akses pasar, sumber daya manusia, akses permodalan/pembiayaan, inovasi usaha dan tidak efektifnya penataan kelembagaan. Masyarakat pesisir menurut Victor

P.H. Nikijuluw, (2003) adalah populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah pedalaman. Perbedaan tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, daerah pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan.

Pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir atau berbatu), mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis pesisir mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi di dalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang khas dalam membangun ekonomi maupun kelembagaan lokal sehingga mampu mandiri dan berlanjut. Kemajuan desa-desa merupakan dasar dari keberlanjutan bangsa sehingga diperlukan strategi makro dan mikro agar dicapai kemakmuran bagi masyarakat desa di segenap penjuru nusantara.



membangkitkan ekonomi kerakyatan peranan koperasi sangat penting. Namun demikian bila diperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia selama 30 tahun ini, kinerja koperasi tampaknya makin jauh tertinggal sebab bila ditelusuri secara eksternal kondisi ekonomi dan politik yang ada tampaknya memang masih kurang konduktif bagi perkembangan koperasi. Sedangkan secara internal dapat ditelusuri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek permodalan dan lingkungan eksternal, aspek kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah, sehingga untuk mengembangkan koperasi diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan baik fungsi koperasi, profesionalisme pengurus, program kerja pengurus baik jangka pendek maupun jangka panjang. Juga peningkatan kualitas sumber

daya manusia baik melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. Disamping itu upaya memperbesar modal dan mempermudah peminjaman/kredit. Strategi pengembangan koperasi harus mendapat perhatian pemerintah, perguruan tinggi serta masyarakat luas melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan keputusan tertinggi, khususnya dalam mensukseskan diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian nasional. Perspektif anggota menjadi peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi karena anggota sebagai user dan pemilik koperasi, hasil penilaiannya cukup baik berdasarkan peningkatan dalam memperoleh anggota baru dan koperasi juga mampu mempertahankan anggota lama yang dimiliki.

Prawirokusumo, (2001) menyatakan bahwa adanya kesempatan anggota koperasi mengikuti pendidikan dan

berkembangnya usaha anggota koperasi menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi motor (*engine*) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (*social welfare*), sekaligus menjadi perangkat yang ampuh untuk lebih pemeratakan kesejahteraan selaras dengan program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Sebagai bentuk manifestasi ekonomi kerakyatan, koperasi merupakan cermin yang tepat bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi. Widarmanto (2008).

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa persoalan koperasi sebenarnya bukanlah pada kuantitas koperasi itu sendiri, sebab dari tahun ke tahun koperasi tumbuh dimana-mana, terkhusus pada wilayah pesisir akan tetapi lebih pada kualitasnya. Koperasi sebagai salah satu wadah untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan, dan keberadaan koperasi pada wilayah pesisir seyogyanya dapat menjadi suatu aset besar bagi masyarakat pesisir dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomi. Akan tetapi keberadaan koperasi di Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota/masyarakat, padahal bantuan dan kebijakan sudah diberikan dan tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi

dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir. Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Secara individu masyarakat pesisir sangat sulit berkembang karena lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki, ketidakpastian pendapatan, kelembagaan koperasi yang masih lemah, termasuk kebutuhan modal.[]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori adalah penjelasan sistematis tentang suatu fakta dan atau hukum yg berhubungan dengan aspek kehidupan. Teorijuga diartikan sebagai kumpulan dari konsep, prinsip, definisi, proposisi yang terintegrasi yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena dengan fokus hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena. Baumann (2005) berpendapat bahwa sebuah teori yang baik memiliki ciri sederhana (*parsimony*), memiliki ketepatan dalam prediksi (*accuracy*), dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai bidang kehidupan (*verifiability*).

2.1. Arti Lambang Koperasi

Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia,

mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi; Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:

1. Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
2. Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;
3. Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi;
4. Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;

Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;

Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenalan pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia, Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat :

1. Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;
2. Gambar : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia;

Penggunaan Lambang Koperasi



Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 17 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.

Pada Pasal 2 tertulis bahwa : "Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini."

Pada Pasal 3 tertulis : "Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi Indonesia yang baru." Dan pada pasal 6 tertulis bahwa : "Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku."

2.2. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing co-operation. (Co = bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan.

- Margaret Digby

Menulis tentang “ *The World Cooperative Movement* “ mengatakan bahwa koperasi adalah :

1. Kerjasama dan siap untuk menolong
2. Adalah suatu usaha swasta tetapi ada perbedaan dengan badan usaha swasta lain dalam hal cara untuk mencapai tujuannya dan penggunaan alatnya.

- Dr. C.R Fay

.....suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan tingkat hubungan mereka dengan perserikatan itu.

- Dr. G. Mladenata

Didalam bukunya “ *Histoire des Doctrines Cooperative* “ mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber sumber yang disumbangkan oleh anggota.

- H.E. Erdman

Bukunya “ *Passing Monopoly as an aim of Cooperative* ” mengemukakan definisi sebagai berikut :

1. Koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi
2. Rapat anggota memutuskan kebijakan dasar juga mengangkat dan meberhentikan pengurus
3. Pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota.
4. Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan daripada modal yang dimasukkan.

5. Anggota membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar.
6. Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan batas yang berlaku yaitu sesuai dengan tingginya yang berlaku di masyarakat.
7. SHU (Sisa Hasil Usaha) dibayar pada anggota yang besarnya sesuai dengan jasa anggota
8. Dalam hal mengalami kegagalan, anggota hanya bertanggung jawab sebesar simpanannya di koperasi

- Frank Robotka

Bukunya yang berjudul “ *A Theory of Cooperative* “ menyakan bahwa penulis penulis Amerika serikat umumnya menerima ide ide tentang koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang anggotanya merupakan langganannya. Koperasi diorganisasikan , diawasi dan dimiliki oleh para anggotanya yang bekerja untuk kemanfaatan mereka sendiri
2. Praktek usahanya sesuai dengan prinsip prinsip Rochdale

3. Koperasi adalah suatu kebalikan dari persaingan yaitu bahwa anggota lebih bersifat kerja sama daripada bersaing diantara mereka
4. Koperasi bukan perkumpulan modal dan tidak mengejar keuntungan, lain dengan badan usaha bukan koperasi yang mengutamakan modal dan berusaha mendapatkan keuntungan
5. Keanggotaan koperasi berdasarkan atas perseorangan bukan atas dasar modal

- Dr. Muhammad Hatta

Dalam bukunya “*The Movement in Indonesia*” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari :

- Solidaritas
- Individualitas
- Menolong diri sendiri
- Jujur

2.3. Tentang Perkoperasian

- UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia)

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

Itulah beberapa pengertian mengenai Koperasi, yang sudah menjelaskan pengertian pengertian koperasi dari berbagai sisi. Namun jika hanya sebatas pengertian tidak akan cukup untuk lebih mengenal koperasi, maka akan dicoba menjelaskan selanjutnya mengenai hal hal apa saja yang ada di dalam manajemen koperasi.

Apa Prinsip Koperasi ?

(UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian indonesia)

1. Keanggotaanya sukarela dan terbuka. Yang keanggotaanya bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gender.
2. Pengawasan oleh anggota secara Demokratis. Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Laki laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang

sama (satu anggota satu suara). Pada tingkatan lain koperasi juga dikelola secara demokratis.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas.

Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua tujuan seperti di bawah ini :

- a. Mengembangkan koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.
 - b. Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
 - c. Mendukung kegiatan lainnya yang disepakati dalam rapat anggota.
4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi yang otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Dalam setiap perjanjian dengan pihak luar ataupun dalam, syaratnya harus tetap menjamin adanya upaya pengawasan demokratis dari anggota dan tetap mempertahankan otonomi koperasi.

5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi. Tujuannya adalah agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
6. Kerja sama antar koperasi. Dengan bekerja sama secara lokal, nasional, regional dan internasional maka gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif serata dapat memperkuat gerakan koperasi.
7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijaksanaan yang diputuskan oleh rapat anggota.

2.4. Kelembagaan Ekonomi

North (1993) adalah merupakan tokoh ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economic*) yang memperoleh nobel ekonomi pada tahun 1993, kelembagaan adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang

diinginkan. Pendapat North tersebut jika dikaitkan dengan keberadaan kelembagaan koperasi bahwa ada aturan atau norma yang mengikat untuk dilaksanakan dalam mengelola koperasi, antara lain adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai suatu aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan. Demikian juga dengan Ronald H. Coase pada tahun 1991. Nobel yang diperoleh kedua tokoh tersebut turut menjadi pemicu perkembangan keilmuan ekonomi kelembagaan baru di dunia saat ini. Pemikir ekonomi kelembagaan baru menolak sebagian asumsi ajaran ekonomi klasik/neoklasik dan menganggapnya tidak realistis seperti tidak ada biaya transaksi (*zero transaction cost*) dan rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*). Ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya. Pada titik ini ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibikin (teori

kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain.

Era Globalisasi saat ini, persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan diantisipasi. Demikian halnya dengan para pelaku ekonomi khususnya koperasi, terutama terhadap kinerja koperasi yang dituntut untuk cepat tanggap dalam mengambil keputusan untuk mencegah hilangnya peluang yang ada atau sebaliknya akan mendatangkan kerugian bagi koperasi. Sehubungan dengan hal itu, koperasi harus lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang terjadi didalam lingkungan koperasi itu sendiri atau bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian. Dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, banyak yang harus dihadapi baik masalah intern koperasi seperti permodalan, manajemen, maupun masalah ekstern koperasi seperti mekanisme pasar, campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Dari segi kuantitatif perkembangan koperasi cukup banyak, namun secara kualitatif belum sepenuhnya menggembirakan. Oleh karena itu, koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis, baik

internal maupun eksternal dalam mencaipai tujuan melalui sebuah struktur dan mekanisme dan system yang jelas.

Teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons, (1951:5-6) yang diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Menurut Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system sosial, meliputi : adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (survive), untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Adaptation*: fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya. Adaptasi dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal.
2. *Goal attainment*; pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi pencapaian tujuan atau *Goal attainment* difungsikan oleh system

kepribadian dengan menetapkan tujuan system dan memobilisasi sumber daya untuk mencapainya.

3. *Integrastion*: artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
4. *Latency*: laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan *cultural*. Lalu bagaimanakah Parson menggunakan empat skema diatas, yakni; dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.

Dalam hal ini, menurut peneliti bahwa dalam kelembagaan koperasi terdapat struktur yang berfungsi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan. Aspek kelembagaan (keorganisasian) berupa sesuatu yang lebih dinamis yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, keanggotaan, dan lain-lain. Dalam artian bahwa dalam sebuah struktur terdapat peran atau fungsi, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum yang merupakan sebuah system hubungan kegiatan dengan tujuan. Adaptasi merupakan cara terbaik dalam menyesuaikan diri, baik secara internal maupun eksternal (masyarakat), pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik jika

semua sumberdaya yang terlibat dalam sebuah struktur saling beradaptasi dan bekerjasama berdasarkan fungsinya masing-masing dalam mengatur hubungan-hubungan satu dengan lainnya (integrasi), demikian pula organisasi harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk mempermudah mencapai tujuan (*Goal attainment*) berdasarkan visi misinya dengan memperhatikan kultur dan norma yang berlaku (*latency*). Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing-masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang di atasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. Parson memberikan jawaban atas masalah yang ada pada fungsionalisme structural dengan menjelaskan beberapa asumsi sebagai berikut;

1. System mempunyai *property* keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. System cenderung bergerak kearah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. System bergerak statis, artinya ia akan bergerak pada proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu system akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya.

5. System akan memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua hal penting yang dibutuhkan untuk memelihara keseimbangan system.
7. System cenderung menuju kerah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah system dari dalam.

Program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Kegiatan yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang paling relevan adalah melalui penguatan kelembagaan koperasi, Herry Yulistiyono (2007). Sweeden (2008) menyatakan pemahaman ekonomi pesisir memberikan kontribusi ekonomi penting dari ekosistem untuk perekonomian karena beberapa alasan. Pertama, ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah besar nilai ekonomi terhadap perekonomian

pesisir. Kedua, semua negara pada umumnya, dan ekonomi pesisir khususnya, memiliki sistem yang kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif, dan pemerintah yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan yang membayar biaya produksi.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kelembagaan, seperti koperasi merujuk kepada sesuatu yang bersifat strategis yang dinamis di dalam masyarakat. Kelembagaan koperasi adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan aktivitasnya pada suatu masyarakat yang memiliki tujuan dan system tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang harus dilaksanakan berdasarkan AD dan ART koperasi. Dengan demikian masyarakat yang terlibat dalam kelembagaan koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan anggota.

Meskipun batasan kelembagaan dan organisasi berbeda-beda menurut berbagai ahli, namun apa yang dimaksud tersebut adalah merupakan suatu yang berpola dan berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Oleh sebab itu ekonomi kelembagaan mempelajari dan berusaha memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi atau

sistem terkait yang lebih luas. Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Syahyuti, (2009) kata kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya.

Kelembagaan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada dua, yakni: Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Artinya Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Seiring waktu dan perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Subandi (2013). Koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yg paling ideal, dimana anggotanya, juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen dan sekaligus sebagai pemilik

Herlina Setiyarini, Wisnu, (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa koperasi menjadi pemikiran Hatta untuk memajukan bangsa Indonesia melalui beberapa ide yang membangun perekonomian rakyat, seperti ide Hatta mempelajari gerakan koperasi di negara-negara Eropa kemudian Hatta terapkan di Indonesia diantaranya koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang lemah. Ide Hatta menarik dan dapat membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Namun, karena tidak adanya dukungan dari rakyat ide Hatta mengalami kegagalan. Mohammad Hatta dikenal sebagai salah satu pemimpin bangsa, pemikir, dan juga sebagai salah satu peletak dasar Indonesia. Mohammad Hatta dikenal sebagai ekonom Indonesia yang banyak mencurahkan pemikirannya terhadap kemajuan bangsa pada umumnya, dan bidang ekonomi pada khususnya. Mohammad Hatta dikenal sebagai pencetus gerakan koperasi Indonesia, bahkan mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Deliar Noer, Mohammad Hatta (1990).

H.Masngudi, (1990). Bahwa sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-

kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya dikenal dengan “Rochdale Principles” Waktu yang hampir bersamaan tersebut di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam. Awal pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. Dipelopori oleh R. Aria Wiratmadja, seorang patih dari Purwokerto (1896) mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Modal yang diperoleh dari uangnya sendiri dan dari kas masjid. Setelah mengetahui bahwa hal itu tidak boleh, maka ia mengembalikannya secara utuh. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita terjatoh oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Kegiatannya lebih lanjut dikembangkan oleh seorang asisten residen Belanda di Purwokerto bernama De Wolff van Westerrode yang bermaksud mengadakan kredit koperasi untuk penduduk tani yang berdiam dalam daerahnya. Dalam karangannya yang dimuat dalam “ *Tijdschrift voor Nijverheid en Handel* “ tahun 1896 menarik perhatian, isinya mengenai cara bekerjanya yang kemudian menjadi sebuah bank, yang

diberi nama “ Poerwokertasche Hulp “. Bank ini menjadi contoh yang pertama bagi Volks credit bank lainnya yang didirikan diseluruh pulau Jawa dan Madura. Bank inilah yang memberikan kredit bagi petani dengan berdasarkan *philantropie* (kedermawanan).

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perkembangan koperasi sangat mempengaruhi perkembangan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Kelembagaan, atau institusi, pada umumnya lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu system, Tony, (2003). Peneliti menilai bahwa kelembagaan merupakan suatu organisasi yang memiliki aturan main dan system yang ditetapkan oleh pengelola dan pelaksana sebagai sarana dan wadah

untuk mencapai tujuan berdasarkan norma dan etik organisasi dan individu.

Pada tahun 1908 Raden Soetomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkann koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kasadaran masyarakat akan manfaat koperasi masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam memelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industry kecil dan kerajinan, namun tidak bertahan lama, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu. Setelah itu perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Studi Club 1928 sebagai kelompok intelektual Indonesia sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa, sehingga pada tahun 1939 koperasi di Indonesia tumbuh pesat mencapai 1712 buah dan terdaftar sebanyak 172 buah dengan anggota sekitar 14.134 orang. (Subandi, 2013).

Muhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju pada koperasi didahulukan kepentingan bersama, bukan

keuntungan, dalam bukunya “*The Movement in Indonesia*” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur. (Subandi, 2013).

ILO *recommendation* nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi. Menurut *Internasional Cooperative Alliance (ICA)* Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya

bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Prinsip-prinsip koperasi. *Internasional Cooperative Alliance* (ICA) (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah:

1. Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik dan agama,
2. Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan,
3. Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka,
4. Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya,
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi,

6. Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para nggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional,
7. Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggotanya.
8. Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Koperasi Produsen. Koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen.
 - b. Koperasi Konsumen. Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen.
 - c. Koperasi Jasa. Koperasi yang khusus melakukan kegiatan usaha memberi jasa kepada anggota dan masyarakat.
 - d. Koperasi Simpan Pinjam/Kredit. Koperasi yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga ringan.
 - e. Koperasi Serba usaha

Selanjutnya Soedjono (1997) menyatakan, keberhasilan koperasi dari segi usaha mencakup aspek peningkatan jumlah anggota, modal koperasi, jumlah dan volume usaha, pelayanan sosial kepada anggota, dan

kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dari segi organisasi mencakup aspek produktivitas, efektivitas, keadilan, dan kemantapan. Selanjutnya Ropke, (1997) menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah anggota yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan SHU. Akan tetapi menurut peneliti bahwa walaupun peningkatan jumlah anggota koperasi jika anggota tidak merasa memiliki dan tidak memberi kontribusi pengembangan usaha koperasi, maka kinerja koperasi belum memberikan dampak positif. Demikian pula modal koperasi yang terhimpun jika tidak dikelola pada usaha-usaha yang produktif maka tentu saja koperasi tersebut tidak akan berkembang, terlebih jika pengurus tidak transparan mengelola keuangan. Ekonomi kerakyatan yang dimanifestasikan melalui koperasi memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil.

Sistem koperasi menggambarkan interaksi di antara organisasi dan koperasi, di satu pihak dengan para anggotanya di pihak lainnya, berlaku norma-norma dan prinsip koperasi, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Fungsi anggota sebagai pemilik yang membiayai, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan-keputusan yang diwujudkan pada partisipasi mereka di dalam penyelenggaraan rapat anggota. Laporan

pengurus koperasi kepada rapat anggota menggambarkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasi-an dan control) serta fungsi-fungsi perusahaan koperasi (sumber daya manusia, keuangan, produksi layanan dan penyebaran informasi), karena itu kualitas dan kontiyuitas penyelenggaraan rapat anggota menjadi indikator penting di dalam system pengorganisasian koperasi yang secara *buil-in* mencerminkan inplementasi dari nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi tersebut. Untuk itu, berbagai norma/aturan tentang organisasi dan usaha koperasi harus disusun secara rinci, mudah dimengerti, disosialisasikan dan ditaati. Mengukur kinerja koperasi baik sebagai unit-unit ekonomi mikro maupun makro sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat dilakukan dari berbagai segi menurut kepentingannya, tetapi indikator apapun yang hendak ditampilkan seharusnya tidak terlepas dari dasar pengevaluasiannya yaitu tujuan dikembangkannya kehidupan berkoperasi dalam upaya membangun ekonomi secara mandiri. Arifin, (2010).

Menurut hemat peneliti bahwa jika prinsip-prinsip koperasi dipegang teguh oleh pengurus, pengawas dan anggota serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan konsisten melaksanakan RAT setiap tahun dan pemangku

kepentingan (Dinas Koperasi) aktif memberikan bimbingan dan evaluasi, maka tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota akan terwujud. Hal itu sejalan dengan pendapat Ketua Koperasi Berkat bahwa sepanjang ada kesungguhan dan sikap profesionalisme pengurus dalam mengelola koperasi maka koperasi bisa menjadi wadah pengembangan ekonomi anggota dan pengurus. Kaharuddin Aziz, (2015).

Sitio, (2001) mengatakan bahwa anggota koperasi harus berperan aktif, memiliki komitmen, dan mampu berinovasi untuk memajukan koperasi, sehingga koperasi sebagai wadah dalam melakukan aktivitas ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Oleh sebab itu, status keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi. Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Cut Zurnali, (2010) menyatakan bahwa perhatian umum dan tujuan kunci dari unit organisasi SDM adalah untuk mencari pengukuran yang dapat mengestimasi secara akurat komitmen para pekerjanya dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan komitmen pada organisasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kajian penelitian yang luas dalam ilmu psikologi dan manajemen

adalah tentang konsep dan peranan komitmen organisasional (*organizational commitment*).

Dalam kajian tentang komitmen organisasional mencoba menganalisis karyawan-karyawan perusahaan yang dalam menjalankan aktivitas organisasi bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti perusahaan telekomunikasi dan informasi, perbankan, pertambangan, pemasaran, konsultan perencanaan, otomotif, semi konduktor, dan bioteknologi, Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing dimensi komitmen organisasional tersebut sebagai berikut:

1. Komitmen afektif (*affective commitment*) adalah perasaan cinta pada organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.
2. Komitmen kontinyu (*continuance commitment*) adalah perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi.
3. Komitmen normatif (*normative commitment*) adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam

organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan. (Wikipedia. Komitmen Organisasi, 2014)

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen adalah kekuatan relatif individu dalam melibatkan dirinya dengan mempertahankan nilai dan tujuan organisasi. Brian, (2008).

Johannessen, Olsen, and Lumpkin, (2011), Kemampuan berinovasi adalah kemampuan anggota menghasilkan ide-ide atau gagasan kreatif yang diwujudkan dalam bentuk inovasi yang bersifat kebaruan. Oleh sebab itu, karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, berkewajiban memberikan kontribusi kinerja pada organisasinya. Dipihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Dengan demikian anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu

kelembagaan ekonomi. Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi. Alternatif pemurnian kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan;

- a. Memperbaiki dan melengkapi aturan perundang-undangan (mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RUU per koperasian);
- b. Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan Pembina koperasi dengan materi dan metoda yang tepat, agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh (Koperasi yang genuine);
- c. Melakukan sosialisasi/promosi melalui media yang tepat terarah dan terencana serta berkesinambungan;
- d. Menyusun standar dan metoda yang tepat bagi mata ajaran koperasi untuk mendukung kaderisasi koperasi ditingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta;
- e. Menyerahkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan koperasi kepada gerakan koperasi sendiri.

Kemampuan suatu perusahaan dalam berinovasi, tidak diragukan lagi dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Terlebih di era Freemium dewasa ini, dimana konsumen semakin menuntut barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang justru semakin terjangkau, bahkan gratis. Sayangnya, proses inovasi tidak selalu berjalan mulus. Hasil riset yang digelar PPM Manajemen *Center of Innovation and Collaboration* (CIC) dengan mensurvei 164 perusahaan di Indonesia menyebutkan hampir 80% perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa faktor biaya adalah salah satu faktor penghambat aktivitas inovasi, inovasi tidak serta-merta berkembang hanya dengan menambah dana R&D. Tantangan terbesar justru terletak pada upaya menggerakkan seluruh karyawan yang *notabene* adalah pelaku aktivitas inovasi itu sendiri, dan untuk memahami pentingnya berinovasi bagi kelangsungan dan keunggulan perusahaan. (Wikipedia, 2014)

Anggota koperasi memiliki kewajiban antara lain: (1) Mematuhi AD/ART, (2) Partisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, (3) Mengembangkan kebenaran berdasarkan atas azaz-azaz kekeluargaan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi

dengan para anggotanya. Anggota koperasi juga memiliki hak antara lain:

1. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
2. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
3. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,
4. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki wewenang antara lain; (a) Menetapkan anggaran dasar, (b) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha dan (c) Menetapkan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas-tugas pengurus adalah; (1) mengelola koperasi dan usahanya, (2) menyelenggarakan rapat anggota, (3) memelihara daftar buku anggota dan pengurus, (4) pengawas dipilih dari dan oleh koperasi dalam rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas pengawas: (a) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan

koperasi, (b) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan, dan wewenang pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang meningkat atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Menurut Syahyuti, (2006), komponen kelembagaan adalah :

1. Person. Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Kepentingan. Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan/ tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
3. Aturan. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. Struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Menurut Saudin Sijabat, (2010). Pengendalian anggota pada kelembagaan koperasi yang menjadi penekanan dalam organisasi dan manajemen koperasi adalah:

- a. Pengendalian anggota pada kelembagaan koperasi yang menjadi penekanan dalam organisasi dan manajemen koperasi adalah :
 - 1) Pengurus, Pengawas dan Karyawan Koperasi
 - 2) Kelengkapan dan pemeliharaan administrasi organisasi

3) Rencana Pengembangan Usaha Koperasi

4) Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat pengawas, pendidikan koperasi, dan kunjungan.

b. Usaha Koperasi.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengevaluasi usaha koperasi adalah dampak berupa manfaat yang diberikan oleh usaha tersebut kepada lembaga dan anggota koperasi. Artinya harus memperhatikan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota dan pertimbangan perolehan pendapatan dari usaha tersebut.

c. Laporan Pengurus

Laporan pengurus secara tertulis harus disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan rapat. Hal tersebut diperlukan agar setiap anggota mempunyai waktu untuk mempelajari dan mengevaluasi laporan dimaksud secara cermat. Dokumen Bahan Pengendalian Anggota pada Koperasi.

Dari perkembangan pelaksanaan rapat anggota yang biasa dilakukan oleh koperasi, beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dan perlu dicermati sebagai bahan pengendalian koperasi oleh anggota adalah sebagai berikut:

1) Susunan Acara Rapat, 2) Tata Tertib Rapat, 3) Berita Acara Rapat, 4) Perkembangan Organisasi, 5) Susunan Pengurus, Pengawas, 6) Daftar Karyawan Koperasi, 7)

Surat Masuk dan Keluar, 8) Daftar simpanan anggota, 9) Ilustrasi Neraca 2 tahun terakhir, 10) Laporan Perhitungan Hasil Usaha, 11) Laporan Perhitungan Pembagian SHU, 12) Laporan arus kas, 13) Laporan perubahan kekayaan bersih, dan, 14) Laporan perubahan inventaris.

2.5. Pengelolaan Koperasi

Pengelolaan koperasi tergantung dari berbagai faktor, akan tetapi pada umumnya setiap koperasi akan berpedoman pada “Tiga Sehat”. Adapun pedoman tiga sehat itu meliputi (blogspot.com, online 2 Agustus 2016) :

- a. Adanya kelancaran komunikasi antara para pengurus antara pengurus dengan anggota, dan antara sesama anggota yang tercermin pada administrasi dan manajemen.
- b. Adanya kesadaran sekurang-kurangnya pengertian para anggota, bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia ikut serta pada kegiatan koperasi. Sehat organisasi dalam arti bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dapat dijalankan sesuai ketentuan yang ada sehingga tidak ada lagi benturan-benturan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan karena semua pihak telah mengikuti aturan yang

ada dalam AD maupun ART, begitu juga kesadaran antara anggota maupun pengurus

- c. Dapat terjalin dengan baik agar koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan usaha, neraca, dan hasil rapat anggota tahunan koperasi.

1. Sehat Organisasi

Suatu organisasi yang sehat dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep sehat organisasi yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Hussien (2014) dalam organisasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi dalam melalui rapat keanggotaan. Oleh sebab itu, peneliti dapat menguraikan bahwa kecenderungan seseorang dalam organisasi harus berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam kegiatan rapat-rapat tentang kemajuan koperasi, menjadi tanggung jawab anggota terhadap akuntabilitas kinerja koperasi.

Charles B.Lowry and Paul J. Hanges, (2008) mengatakan konsep organisasi yang sehat merupakan salah

satu yang memiliki profil yang di dalamnya beberapa iklim dimensi bekerja untuk menjaga sinergitas organisasi dan daya tanggap lembaga. Organisasi yang sehat melakukan kebijakan, praktik, dan prosedur yang memberdayakan karyawan dan hanya menekankan pentingnya terus menerus pembelajaran dan inovasi yang bersifat timbal balik untuk memenuhi tuntutan tersebut dari sebuah lingkungan yang selalu berubah, hal itu semua akan menentukan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Untuk itu, peneliti menilai bahwa anggota koperasi harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan tingkat pertanggungjawaban anggota koperasi berkaitan dengan kemajuan koperasi serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Barrett, Pamela Bowen, (2001) berpendapat bahwa Penetapan AD & ART merupakan pertanggungjawaban pengurus sebagai cerminan akuntabilitas koperasi.

Moheriono (2012), menjelaskan bahwa salah satu variabel pembentuk kompetensi inti organisasi yg baik adalah dari kompetensi individu karyawannya itu sendiri, antara lain percaya diri, mampu mengeluarkan pendapat. Organisasi dikatakan sukses bila organisasi tersebut dapat melandasi kegiatannya dengan kreativitas inovasi yang tinggi, pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan/skill dari karyawannya. Seluruh karyawan harus mengikuti dari

visi, misi organisasi, strategi program, semua itu diapresiasi dengan kompetensi inti karyawan. Artinya menurut peneliti bahwa seluruh aktivitas individu anggota koperasi berdasarkan AD dan ART dan aktif menghadiri pelaksanaan rapat jika diundang. Robbins, (1996) menjelaskan, organisasi dipandang pula sebagai satuan sosial yang dikoordinasi secara sadar, yang tersusun atas dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Pendapat peneliti bahwa anggota yang terlibat dalam kepengurusan koperasi hendaknya aktif memberi peran kapan saja dan di mana saja, terkhusus apabila dilaksanakan rapat-rapat koperasi. Sejalan dengan pendapat Hussain (2014) bahwa dalam rapat keanggotaan koperasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi.

SB Hari Lubis (1987), bahwa Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dimensi organisasi dapat dibedakan

dalam dimensi struktural dan dimensi kontekstual yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimensi Struktural, menggambarkan karakteristik internal suatu organisasi yang terdiri atas; 1) Formalisasi, menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi, 2) Spesialisasi, menunjukkan derajat pembagian kerja dalam organisasi, 3) Standardisasi, menggambarkan derajat kesamaan dalam pelaksanaan kerja, 4) Sentralisasi, menunjukkan pembagian kekuasaan menurut hirarki dalam organisasi, 5) Hirarki Otoritas, menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum, 6) Kompleksitas, menunjukkan banyaknya kegiatan (sub sistem) dalam organisasi yang terdiri kompleksitas vertikal dan horizontal, 7) Profesionalisme, menunjukkan tingkat pendidikan formal ataupun non formal rata-rata yang dimiliki anggota, dan 8) Konfigurasi, menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi ke dalam bagian-bagian secara vertikal maupun horisontal.
2. Dimensi Kontekstual, menggambarkan karakteristik keseluruhan suatu organisasi yang mencakup : 1) Ukuran organisasi, menunjukkan jumlah anggota organisasi, 2) Teknologi organisasi, menunjukkan

jenis dan tingkat teknologi dari sistem produksi organisasi, 3) Lingkungan, menggambarkan keadaan elemen lingkungan yang terdapat di luas batas-batas organisasi terutama elemen lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi.

Malayu SP Hasibuan (2001), menjelaskan bahwa organisasi mengandung unsur-unsur yang membentuk keberadaan organisasi, sebagai berikut :

1. Manusia (*human factor*), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin.
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya.
3. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
5. Struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis.
7. Lingkungan (*environmental external social system*), artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang

saling memengaruhi seperti adanya sistem kerja sama social.

Rummler, Brache dan Madron (1995), menyokong pendapat di atas. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang baik, maka sistem organisasi harus dibentuk dengan baik sehingga dapat melicinkan proses dan hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan anggota.

2. Sehat Usaha

Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk kegiatan usaha koperasi adalah dampak berupa manfaat yang diberikan atas usaha tersebut kepada lembaga dan anggota koperasi. Artinya harus memperhatikan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota dan pertimbangan perolehan pendapatan dari usaha tersebut serta upaya-upaya strategi dalam perkembangan usaha. Yona Perwitasari, dkk (2013), Faktor pendukung yang mampu mendukung berkembangnya berbagai bidang usaha di koperasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan anggota yang didukung dengan manajemen yang solid;

2. Modal yang besar/ kepemilikan modal yang kuat membuat koperasi ini terus berkembang;
3. Sarana prasarana yang baik guna memudahkan segala bentuk pengelolaan bidang usaha–bidang usaha dalam koperasi ini. Adapun cara mengoptimalkan segala faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Sistem informasi yang terbuka melalui beberapa sosialisasi yang telah dilakukan dengan anggotanya melalui pengumuman yang ditempel untuk segi bidang usahanya, untuk kinerja keuangannya biasanya dibagikan dengan buku laporan pertanggungjawaban pada saat RAT;
 - 2) Permodalan digunakan untuk menaikkan plafon pinjaman agar banyak yang terserap ke anggota sehingga adanya modal itu, sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk disimpan saja atau didepositokan;
 - 3) Sarana prasarana dipakai dengan baik agar sarana dan prasarana ini mampu dimanfaatkan secara maksimal

Dampak makro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial

dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka. (Wikipedia, 2014). Karakteristik individu berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektifitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sehat usaha koperasi dapat diwujudkan jika layanan konsultasi usaha berjalan, kebutuhan anggota terpenuhi, peran serta anggota dalam perkembangan usaha, peran membangun kerjasama dalam hal perencanaan usaha, menyusun laporan usaha dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha. Sumber daya manusia yang terlibat didalamnya harus memenuhi kewajiban-kewajibannya agar sehat usaha koperasi berjalan dengan efektif. Usaha tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sesuai keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota dan

senantiasa membuat laporan perkembangan usaha secara terbuka.

Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk kegiatan usaha koperasi adalah dampak berupa manfaat yang diberikan atas usaha tersebut kepada lembaga dan anggota koperasi. Artinya harus memperhatikan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota dan pertimbangan perolehan pendapatan dari usaha tersebut serta upaya-upaya strategi dalam perkembangan usaha. Yona Perwitasari, dkk (2013), Faktor pendukung yang mampu mendukung berkembangnya berbagai bidang usaha di koperasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan anggota yang didukung dengan manajemen yang solid;
2. Modal yang besar/ kepemilikan modal yang kuat membuat koperasi ini terus berkembang;
3. Sarana prasarana yang baik guna memudahkan segala bentuk pengelolaan bidang usaha–bidang usaha dalam koperasi ini. Adapun cara mengoptimalkan segala faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem informasi yang terbuka melalui beberapa sosialisasi yang telah dilakukan dengan anggotanya melalui pengumuman yang ditempel untuk segi bidang usahanya, untuk kinerja keuangannya biasanya dibagikan dengan buku laporan pertanggungjawaban pada saat RAT;
- 2) Permodalan digunakan untuk menaikkan plafon pinjaman agar banyak yang terserap ke anggota sehingga adanya modal itu, sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk disimpan saja atau didepositokan;
- 3) Sarana prasarana dipakai dengan baik agar sarana dan prasarana ini mampu dimanfaatkan secara maksimal.

Dampak makro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka. (Wikipedia, 2014). Karakteristik individu berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektifitas. Para individu

pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sehat usaha koperasi dapat diwujudkan jika layanan konsultasi usaha berjalan, kebutuhan anggota terpenuhi, peran serta anggota dalam perkembangan usaha, peran membangun kerjasama dalam hal perencanaan usaha, menyusun laporan usaha dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha. Sumber daya manusia yang terlibat didalamnya harus memenuhi kewajiban-kewajibannya agar sehat usaha koperasi berjalan dengan efektif. Usaha tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sesuai keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota dan senantiasa membuat laporan perkembangan usaha secara terbuka.

3. Sehat *Financial*

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang

dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan, hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Unsur manajemen keuangan harus diketahui oleh seorang manajer. Misalkan saja seorang manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur manajemen keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, seorang manajer keuangan harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan harus memahami arus peredaran uang baik eksternal maupun internal.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart. (2005) bahwa pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik. Untuk itu Aktivitas manajemen manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana

eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.

Ramudi Ariffin, (2010) menjelaskan bahwa layanan perusahaan koperasi terhadap kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota identik dengan partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan (pengguna jasa) koperasi, bukan “penjualan” barang/jasa seperti layaknya ke konsumen di pasar. Layanan perusahaan koperasi kepada anggota mengandung muatan kewajiban untuk memberi dampak peningkatan perekonomian anggota. Hal tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Gagliardi, Francesca, (2009) bahwa pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan koperasi dapat dilihat dari SHU yang dicapai.

Dengan demikian, pengertian SHU adalah sisa dari partisipasi anggota di dalam membiayai organisasi koperasi, bukan laba yang pengertiannya sebagai balas jasa terhadap modal. Perkembangan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. UU No. 25/1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45. Peneliti berpendapat berdasarkan penjelasan di atas, bahwa sehat *financial* dapat tercapai jika aktivitas pengurus secara optimal melakukan

tingkat perputaran dana seefektif mungkin dalam kegiatan pembiayaan operasional koperasi, seperti peningkatan perkembangan usaha, peningkatan pertumbuhan usaha, peningkatan jumlah pembagian SHU dan transparansi melaksanakan pelaporan perkembangan pelaporan penggunaan dana, pelaporan perkembangan perputaran dana koperasi, pelaporan jasa simpan pinjam dan senantiasa melakukan kegiatan evaluasi pendanaan.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

PengembanganSDMmenjadisalahsatusisentralpembangunan daerah untuk mendukung upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. Bahkan, layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan disetiap daerah makin meningkat. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (2012).

Diera globalisasi saat ini, fenomena koperasi sebagai salah satu usaha mikro, kecil dan menengah yang ternyata bisa bertahan dan berkembang dalam situasi krisis global, menunjukkan bahwa peran koperasi sangatlah penting dalam peningkatan perekonomian terutama bagi sektor menengah ke bawah. Keberadaan koperasi tersebut agar bisa berkembang dan bersaing harus memiliki manajemen yang bagus dan didukung oleh SDM yang professional dalam pengelolaannya. Akan tetapi, kualitas SDM pengurus yang ada saat ini cenderung menjadi salah satu kendala internal yang perlu mendapat perhatian khusus agar bisa memiliki kompetensi dan mampu menggerakkan koperasi sebagai usaha peningkatan ekonomi kerakyatan. Sebagai salah satu upaya peningkatan SDM pengurus koperasi dan mewujudkan tiga sehat koperasi yaitu sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental. Untuk mewujudkan peranan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian dan alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya koperasi harus dikelola sebaik mungkin.

Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi seyogyanya berfungsi untuk memajukan organisasi berdasarkan peran yang diberikan, untuk mencapai hal tersebut maka sumber daya yang terlibat senantiasa mengembangkan dirinya melalui berbagai metode, bahwa pelatihan adalah mempersiapkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka sekarang dan pengembangan mempersiapkan pegawai yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oleh sebab itu diperlukan pula kualitas SDM dalam mengelola kelembagaan sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Gilan, Nader Rajabi; Reshadat, dkk, (2012) bahwa penilaian terhadap kebutuhan koperasi, teknik pelatihan dan pendidikan yang berlaku, senantiasa melakukan program pendidikan dan pelatihan. Shofiatu Rahmah Sugis, (2011) bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel modal insani (dengan indikator pelatihan umum dan pelatihan spesifik) dan variabel modal sosial (dengan indikator dimensi struktural, dimensi relasional, dan dimensi kognitif) terhadap kinerja kelembagaan.

Menurut Veithzal Rivai (2003), Sumber Daya Manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Gary Dessler (1997) adalah kebijakan dari praktik yang dibutuhkan

seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau Sumber Daya Manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan secara maksimal, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Catherine; Hoyt, Ann, (2009) bahwa pelayanan berfokus pada kegiatan hidup sehari-hari yang berperan untuk pelaku yang telah diberikan oleh kombinasi dari organisasi nirlaba dan koperasi.

Pelatihan sumber daya manusia mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan sumber daya manusia umumnya diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan yang telah ada, tujuannya adalah agar setiap karyawan tersebut mampu menghadapi situasi-situasi yang selalu berubah. Sementara itu program pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan manajerial mempelajari

pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan sumber daya manusia lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Pengembangan sumber daya manusia lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah sedangkan pelatihan sumber daya manusia dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana), sehingga diharapkan karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan baik. Ilham (2013). Pelaksanaan Program Pelatihan Konsep, praktek, dan masa depan dari pengembangan sumber daya manusia. Siriwai Prapan, Somsri, (2000)

Tjahjono Widarmanto (2008). Kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, dan penggerak koperasi meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan manajerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun networking, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi optimalisasi pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja. Semua kompetensi tersebut di atas apabila bisa dikembangkan secara maksimal akan menjadi kekuatan yang besar dalam membangun koperasi yang berkualitas. Selanjutnya Moeheriono (2012) mengatakan bahwa di tempat kerja, apabila seseorang mempunyai

kompetensi secara baik atau tinggi jika diintegrasikan dengan kompetensi jabatan, maka orang tersebut kemungkinan besar akan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Pengukuran kompetensi dasar pada setiap individu seseorang telah memudahkan pihak pengelola manajemen atau manager untuk lebih mudah menempatkan orang yang tepat dan tepat pada pekerjaannya (*the right man on the right job*).

Tri Budiarto, (2013), pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen SDM koperasi (wirakoperasi) yang mutlak diperlukan dalam pengembangan koperasi dalam jangka panjang. Pemahaman yang utuh terhadap koperasi dari anggota sebagai dampak kinerja pendidikan dan latihan, serta kinerja manajerial yang profesional sebagai *outcomes* pendidikan manajemen, sangat berpotensi menciptakan kepercayaan anggota. Mereka juga bersedia bergabung dengan koperasi dalam jangka panjang, serta menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan strategi yang diterapkan koperasi. Manfaat-manfaat inilah yang akan menjadi daya saing koperasi yang tidak mudah diikuti oleh pesaingnya. Kompetensi dan komitmen dapat dikaji pada berbagai tingkatan organisasi koperasi namun, tidak sedikit koperasi yang menyia-nyiakan akan pelatihan dan pendidikan yang diberi, antara lain : a) kurangnya

kesadaran anggota akan pentingnya pelatihan dan pendidikan, b) sudah merasa bahwa koperasi tersebut telah berhasil, c) kurangnya partisipasi anggota, d) merasa akan pemahaman tentang koperasi telah memadai, e) sosialisasi koperasi yang belum optimal, dan f) banyak dari anggota, pengurus, maupun ketua koperasi yang kurang mendukung berjalannya koperasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa koperasi dapat berhasil apabila memenuhi kriteria aspek mikro dan aspek makro.

Kriteria aspek mikro adalah berkaitan dengan fungsi dan aspek-aspek pendukungnya yakni guna memenuhi kebutuhan dari para anggota sehingga mampu mensejahterakan anggota-anggotanya. Keberhasilan sebuah koperasi sangat dipengaruhi oleh proses pendirian koperasi itu sendiri dan terdapatnya tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan kebutuhan bersama dari pada anggotanya tersebut. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya koperasi (wirakoperasi) yang mutlak diperlukan dalam pengembangan koperasi dalam jangka panjang. Pemahaman yang utuh terhadap koperasi dari anggota sebagai dampak kinerja pendidikan dan latihan, serta kinerja manajerial yang profesional sebagai *outcomes*

pendidikan manajemen, sangat berpotensi menciptakan kepercayaan anggota.

Rani Puspitasari (2003), manajemen koperasi yang kurang berkembang diantaranya disebabkan oleh kurang apiknya pengelolaan oleh sumber daya manusia yang kurang begitu kompeten dalam menghadapi kemajuan zaman dan teknologi. Manusia sekarang memang kurang memahami apa arti manajemen itu sendiri, oleh karenanya hampir dalam segala aspek dan bidang terutama koperasi tidak dapat terorganisir antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, serta kurang terorganisir juga hubungan antara atasan dengan anggota dibawahnya. Solusi yang tepat dalam menangani masalah ini adalah dengan cara lebih memerhatikan para anggota dalam melakukan segala tindak pekerjaannya, serta dengan cara memberikan penyuluhan secara rutin kepada anggota pada kurun waktu yang sama.

Peneliti berargumentasi berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat dicapai jika program pelatihan seperti simulasi pelatihan usaha, pelaksanaan kegiatan dan model pelatihan berbasis teknologi dan UKM yang berorientasi kreatif dan inovatif optimal dilaksanakan. Selain itu dilaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelatihan usaha yang telah dilaksanakan.

5. Kinerja Kelembagaan

Dalam ilmu ekonomi banyak sekali indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, menggambarkan kondisi, menjelaskan situasi tertentu, atau membuat bentuk dari suatu ketidakteraturan yang terjadi pada suatu dimensi tertentu. Salah satu elemen kunci untuk mengukur level kinerja organisasi adalah dengan menetapkan serangkaian indikator kinerja utama yang dianggap relevan dan penting. Indikator kinerja utama atau (*key performance indicators*) merupakan kriteria yang bersifat terukur (*measurable*) dan dianggap sebagai parameter kunci untuk menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk itu agar koperasi tetap dapat hidup di sektor ekonomi, maka salah satu teknik penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja, pembangunan pedesaan dan lainnya bahkan pembiayaan usaha kecil dan menengah, termasuk keputusan tentang pengelolaan keuangan yang mempengaruhi kinerja koperasi secara total, Simeyo Otieno, (2013).

Torka, Nicole; Looise, (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam perusahaan adalah kunci utama memberikan kontribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif. Departemen pemasaran pada setiap organisasi

adalah internal faktor paling penting dan komunikasi yang efektif mempunyai peranan mempromosikan kinerja. Menurut Moeheriono, (2012), Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis. Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, fungsi, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain.

Brudan (2010) menjelaskan bahwa baik di tingkatan organisasi ataupun individu, salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Antara gagasan, tindakan dan hasil terdapat suatu

perjalanan yang harus ditempuh. Dan barangkali istilah yang paling sering digunakan di keseharian yang menggambarkan perkembangan dari perjalanan tersebut dan juga hasilnya adalah "kinerja" (id.wikipedia.org/.../Manajemen). Jocheb Ropke, 1997; Garbarino and Johnson 1999, Gruen et al. 2000. Menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan anggota koperasi yang ditunjukkan melalui capaian hasil selama pelaksanaan kegiatan operasional dalam periode tertentu.

Robbins (1994) mengemukakan bahwa : *“performance is the measurement of result, it asks the simple question did you get the job done”*. Yang dapat diartikan bahwa kinerja merupakan ukuran suatu hasil yang menyatakan pertanyaan sederhana apa yang anda peroleh dari tugas yang telah dilaksanakan. Ramudi Ariffin, (2010) Mengukur kinerja koperasi baik sebagai unit-unit ekonomi mikro maupun makro sebagai gerakan ekonomi rakyat, dapat dilakukan dari berbagai segi menurut kepentingannya. Tetapi indikator apapun yang hendak ditampilkan seharusnya tidak dilepaskan dari dasar pengevaluasiannya yaitu tujuan dikembangkannya kehidupan berkoperasi yaitu dalam upaya membangun ekonomi masyarakat secara mandiri. Bantuan diberikan harus ditempatkan sebagai faktor stimulus yang membangkitkan respon untuk mampu menolong diri

sendiri, bertanggung jawab sendiri dan percaya diri. Makna dan isi dari istilah kinerja secara komprehensif didiskusikan oleh Folan et al (2007) yang menegaskan tiga prioritas dari kinerja (id.wikipedia.org/):

- *Pertama*, kinerja butuh dianalisa berdasarkan setiap entitas di dalam lingkup lingkungan di mana dia beroperasi. Sebagai contoh kinerja suatu perusahaan harusnya dianalisis di lingkup target pasar di mana dia beroperasi dan bukannya yang tidak relevan dengan wilayah operasinya.
- *Kedua*, kinerja selalu terkait dengan satu atau lebih tujuan organisasi yang ditentukan oleh organisasi yang mana kinerjanya dianalisa. Oleh karenanya, suatu organisasi mengevaluasi kinerjanya berdasarkan pada tujuan dan target yang ditentukan dan diterima secara internal dan bukannya atas target yang digunakan oleh entitas di luar dirinya.
- *Ketiga*, kinerja disaring menjadi karakteristik yang relevan dan bisa dikenali.

Blumenthal (2003) menyatakan bahwa peningkatan kinerja bisa merupakan hasil perbaikan dari salah satu atau lebih aspek berikut ini: (1) Stabilitas organisasi yang terkait apakah layanannya bisa secara konsisten dihantarkan dan organisasi bisa terus bertahan; (2) Stabilitas finansial yang terkait dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya, semisal, kemampuan untuk membayar tagihan-tagihan. Stabilitas finansial seringkali kurang dihiraukan sebagai perihal yang penting dalam pembangun kapasitas; (3) Kualitas program (produk dan layanan) yang didasarkan pada indikator dampak, termasuk riset memadai tentang bagaimana program yang efektif serta sistem pengelolaan hasil keluaran; (4) Pertumbuhan organisasi yang didasarkan pada kemampuan mendapatkan sumberdaya dan menyediakan lebih banyak layanan.

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa kinerja lembaga adalah proses dan hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh suatu lembaga pada suatu periode waktu dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya. Untuk itu kinerja lembaga koperasi dapat dicapai jika jumlah dan pertumbuhan usaha berjalan, tingkat perkembangan SHU dan penerimaan SHU tepat waktu, anggota koperasi semakin meningkat, selain itu tingkat pendapatan anggota semakin meningkat dan pertambahan jumlah penyertaan modal anggota serta efisiensi pengelolaan hasil usaha.

6. Kesejahteraan

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah sesuatu yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan berorientasi

kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Oleh sebab itu kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Todaro (2000) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan

(*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

E. Mitchell, John (2010), kesejahteraan pembangunan berkelanjutan mengacu pada kemampuan suatu bangsa atau Negara untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi mereka sendiri. Manajemen yang berkelanjutan mempertimbangkan semua aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan nilai-nilai social untuk mencapai suau masa depan berkelanjutan. Yudtriasnanto, (2011) jadi *sustainable management asset* berfungsi sebagai dasar pengelolaan masyarakat dan asset yang mereka miliki dalam usaha pencapaian tujuan *sustainable asset management*, dengan *sustainable development* sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan yang kemudian dalam aplikasinya mencapai tujuan tersebut dengan

menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan berupa pembentukan masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana dari upaya pencapaian kesejahteraan mereka. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk membangun pemberdayaan masyarakat pesisir melalui proses kegiatannya. Indikator kesejahteraan rakyat menurut BPS Indonesia (2014) adalah kependudukan, kesehatan dan Gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan kemiskinan dan sosial lainnya.

Stookey (2010), Secara umum kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan cara meningkatkan aksesibilitas mereka aspek sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial, beban kemiskinan yang mereka hadapi akan dapat diatasi dengan cara menyediakan untuk mereka bantuan sosial. Secara ekonomi, beban mereka akan juga dapat diatasi melalui dukungan modal. Secara budaya, beban mereka akan dapat mereka atasi sendiri dengan cara membangkitkan etos kerja dan motivasi bekerja melalui peningkatan keterampilan kerja mereka. Tingkat kesejahteraan anggota melalui usaha yang dijalankan dengan keberadaan koperasi, tingkat taraf hidup masyarakat melalui hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan modal koperasi.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beberapa indikator kesejahteraan diantaranya adalah jumlah dan pemerataan pendapatan, hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima, dengan pendapatan masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. Kesempatan mengikuti pendidikan, taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga. Rusdiana dan Wahyuning (2009), perkembangan usaha anggota taraf hidup anggota didasarkan pada perkembangan usaha keluarga.

Prawirokusumo, (2001), atas adanya kesempatan anggota koperasi mengikuti pendidikan dan berkembangnya usaha anggota koperasi menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau

masyarakat luas. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Stookey, 2010; ZaId & Rao, 2003, bahwa tingkat taraf hidup anggota melalui hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan modal koperasi. Taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga (Ciptani,2000; Rusdiana dan Wahyuning, 2009). Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, 2005). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua

kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa kesejahteraan anggota koperasi dapat dicapai jika; anggota koperasi mempunyai peluang membiayai pendidikan keluarga, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kegiatan kursus keterampilan, tingkat kelancaran dan produktivitas usaha anggota, volume usaha dan pendapatan meningkat serta perkembangan pangsa pasar yang lebih meluas.

1. penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis yang hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis.
2. Penelitian kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).
3. Sehat Kelembagaan Koperasi adalah terpenuhinya sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha, dan kompetensi sumber daya manusia yang dapat

memberikan kontribusi terhadap kinerja koperasi, sehingga tercapainya kesejahteraan anggota koperasi.[]

BAB III

KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI PESISIR

3.1. Aspek Organisasi

Untuk membentuk kinerja lembaga koperasi dalam mencapai kesejahteraan anggota diperlukan indikator senantiasa melaksanakan RAT setiap tahun supaya dapat dievaluasi kemajuan koperasi, selain itu seluruh anggota koperasi wajib hadir jika diundang rapat dan diharapkan keterlibatannya berpartisipasi memberikan ide atau gagasan dan seluruh aktivitas koperasi merujuk serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang sudah ditetapkan, anggota bertanggung jawab jika diberikan tugas untuk kemajuan koperasi sebagai bahagian partisipasi mencapai kinerja koperasi. Charles B.Lowry and Paul J. Hanges, (2008) mengatakan konsep organisasi yang sehat merupakan salah satu yang memiliki profil yang di dalamnya beberapa iklim dimensi bekerja untuk menjaga sinergitas organisasi dan daya tanggap lembaga. Organisasi

yang sehat melakukan kebijakan, praktik, dan prosedur yang memberdayakan karyawan dan hanya menekankan pentingnya terus menerus pembelajaran dan inovasi yang bersifat timbal balik untuk memenuhi tuntutan tersebut dari sebuah lingkungan yang selalu berubah, hal itu semua akan menentukan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dari indikator yang telah disebutkan di atas dalam membentuk sehat organisasi yang memiliki kontribusi terbesar pengaruhnya adalah senantiasa melibatkan anggota koperasi dalam setiap pelaksanaan rapat. Torca, Nicole; Looise, (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam organisasi adalah kunci utama memberikan kontribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif.

Hussen (2006) menegaskan bahwa dalam organisasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi dalam melalui rapat keanggotaan. Artinya bahwa kecenderungan seseorang dalam organisasi harus berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam kegiatan rapat tentang kemajuan koperasi, menjadi tanggung jawab anggota terhadap akuntabilisasi kinerja kelembagaan koperasi dan potensi yang dimiliki. SB Hari Lubis (1987), bahwa Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut

suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Artinya bahwa sinergitas organisasi dengan karyawan berkontribusi terhadap sehat organisasi. Fakta ini menekankan bahwa tanggung jawab anggota dan pengurus dalam organisasi menunjukkan indikator membangun sehat organisasi.

Rampalli, et.al (2013), menegaskan bahwa sehat organisasi berkenaan dengan orang-orang, bekerjanya organisasi, praktik pengelolaan, kesejahteraan dan kinerja karyawan. Artinya bahwa sehat organisasi dengan melibatkan orang-orang melakukan praktik pengelolaan organisasi berkontribusi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota. Cooper. C (1994) menyebutkan bahwa sehat organisasi termasuk di dalamnya adalah faktor intrinstik, yaitu; (a) budaya perusahaan, (b) cara manajerial, (c) cara kerja organisasi yang mempengaruhi kesehatan pekerja dan kesejahteraan, dan (d) kesehatan finansial. Artinya bahwa sehat organisasi berkenaan dengan fungsi manajerial, pengelolaan keuangan serta memahami budaya organisasi. Fakta ini menegaskan bahwa apabila anggota senantiasa dilibatkan dalam rapat dan anggota bertanggung jawab dalam lingkungan organisasi dapat pula memiliki

kontribusi untuk membentuk sehat organisasi. Torka, et.al (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam organisasi adalah kunci utama memberikan kontribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif. Artinya bahwa tingkat kepatuhan pengurus dan anggota pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi merupakan kunci utama sehatnya organisasi koperasi. McNamara M. (2008) menegaskan bahwa untuk membentuk kapasitas organisasi diperlukan diversifikasi sumber daya dan keahlian, bekerja sama, koordinasi untuk melaksanakan program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat keterlibatan dan partisipasi anggota dalam memberikan gagasan atau ide dalam rapat, aktif memajukan koperasi terhadap sehat organisasi.

3.2. Aspek Sumber Daya Manusia

Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatkan kompetensi SDM dengan indikator pengembangan program pelatihan, pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, evaluasi pengembangan program pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha, pengembangan model pelatihan berbasis teknologi, berbasis UKM dan berorientasi kreatifitas dan inovatif akan mengantar kompetensi SDM koperasi. Dan dari indikator tersebut yang memiliki kontribusi terbesar pengaruhnya adalah pelaksanaan simulasi pelatihan usaha,

bahwa bukan lagi saatnya lebih banyak mengutamakan seminar-seminar program pelatihan akan tetapi responden lebih tertarik jika pelaksanaan pelatihan dalam bentuk teknis, artinya lebih senang dengan simulasi sambil praktek peran sebagai pengusaha dan setiap pelatihan dievaluasi kemajuannya, hal itu lebih memungkinkan dan lebih cepat memahami kompetensinya.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan manajerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun *networking*, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi optimalisasi pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja. Sejalan yang dikemukakan oleh Tjahjono Widarmanto (2008) bahwa kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan potensinya sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Oleh sebab itu betapa pentingnya kompetensi SDM dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota koperasi sebab selama ini tidak sedikit koperasi tidak mampu bertahan disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi SDM.

Selain kompetensi SDM dan kesehatan organisasi, turut memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja lembaga koperasi adalah kesehatan *financial* dengan 9 (sembilan) indikator, yakni tingkat keaktifan pengurus melakukan perputaran dana, melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional koperasi, melaksanakan evaluasi pendanaan, pengurus senantiasa melaporkan jasa simpanan, melaporkan perkembangan penggunaan dana, melaksanakan pelaporan perputaran dana, peningkatan perkembangan usaha, peningkatan pertumbuhan usaha koperasi, dan peningkatan jumlah pembagian SHU anggota. Untuk itu, salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja koperasi dapat dilihat dari kemampuan dan kesehatan keuangannya bahwa sehatnya keuangan koperasi jika pengurus optimal memanfaatkan dana yang ada untuk menumbuh kembangkan usaha oleh karena akan berdampak pada pendapatan koperasi yang meningkat, sehingga pembagian SHU anggota juga meningkat.

Oleh karena itu, yang dapat memberikan kontribusi terbesar adalah anggota sangat menginginkan dalam kepengurusan koperasi hendaknya anggota yang terlibat dalam koperasi untuk aktif menyimpan dananya secara sukarela dan anggota mengharapkan kepada pengurus koperasi agar senantiasa melaporkan secara terbuka atas dana yang tersimpan dari anggota, sehingga dana koperasi

dapat meningkat untuk dapat dikembangkan perputarannya untuk membiayai usaha-usaha koperasi dan biaya operasional demi sehatnya pengelolaan keuangan koperasi. Keberadaannya sebagai anggota koperasi dilayani dengan baik setiap saat oleh pengurus jika mereka membutuhkan dana untuk membuka usaha-usaha lain untuk kebutuhan keluarganya dan diberi peran dalam menyusun rencana dan strategi usaha, sehingga dalam rapat anggota tahunan mereka puas atas laporan perkembangan usaha koperasi.

3.3. Aspek Keuangan

Sejalan yang dijelaskan Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart. (2005) bahwa pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik. Untuk itu Aktivitas manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan bersifat positif variabel sehat finansial terhadap kinerja

lembaga koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Demikian pula untuk menilai kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota diperlukan sehat usaha. Bagi organisasi yang sudah mapan ataupun belum tidak terkecuali koperasi sebagai badan usaha dituntut agar melakukan pengembangan usaha terus menerus guna mengantisipasi terjadinya kondisi persaingan usaha yang setiap saat mengalami perubahan. Untuk itu dalam mencapai sehat usaha diperlukan indikator-indikator, yakni; keterbukaan pengurus melayani konsultasi anggota, pelaksanaan layanan usaha anggota, pelaksanaan layanan kebutuhan atau pinjaman anggota, partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha, partisipasi anggota membangun dan mengembangkan kerjasama, partisipasi dan kerjasama anggota membuat perencanaan usaha, partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha, peran anggota membuat perencanaan strategi usaha, dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha.

Tantangan yang dihadapi koperasi tidak selalu berkaitan permodalan besar tetapi komitmen memajukan koperasi dari dalam; soliditas kerjasama dan tolong menolong. Faktor globalisasi, perdagangan bebas harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan. Diperlukan

langkah-langkah strategis menguatkan organisasi berbasis ekonomi ini, yang amat vital adalah adanya fasilitator atau pendamping yang dapat meyakinkan warga tentang urgensi berkoperasi, sebagai jawaban atas masa depan mereka yang mulai samar karena krisis multidimensi. Pemerintah harusnya menjalankan program yang tak sekadar menambah kuantitas koperasi tetapi membangun kesadaran kolektif seperti yang diharapkan Bung Hatta. Mimpi besar Pemprov. Sulsel untuk menjadikan Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional sekaligus simpul jejaring kesejahteraan masyarakat mungkin akan tercapai jika mampu menangani unsur-unsur pembangunan seperti yang disebutkan sebelumnya, unsur penting seperti norma atau nilai-nilai kegotong royongan, tolong menolong dan menguatkan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi. Memampukan mereka untuk tahu dan terampil serta berwatak positif dalam mengelola sumberdaya alam, produksi dan jasa. Selain itu, penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran produk koperasi juga amat dibutuhkan bersama penerapan manajemen modern.

Pengembangan kinerja lembaga koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dan bersifat positif variabel kinerja lembaga

terhadap kesejahteraan anggota. Untuk membetuk kinerja lembaga koperasi diperlukan indikator-indikator, pertumbuhan usaha koperasi, pertambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, tingkat pertambahan jumlah anggota koperasi, tingkat pertambahan penyertaan modal anggota, tingkat pertambahan pendapatan anggota, tingkat perkembangan SHU, tingkat efisiensi pengelolaan SHU, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu. Dari indikator-indikator yang membentuk kinerja lembaga koperasi terdapat indikator yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah pertambahan pendapatan anggota dan Sisa Hasil Usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu diterima tepat waktu.

3.4. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan memberi gambaran tentang peran yang diberikan kepada anggota koperasi dari waktu ke waktu memperlihatkan eksistensinya. Peters J. (2013), menjelaskan pentingnya partisipasi pembangunan lembaga ekonomi, sehingga lembaga ekonomi akan mendapatkan banyak keuntungan dan lebih banyak melakukan pendekatan inovatif. Artinya bahwa untuk membetuk lembaga koperasi mencapai kinerjanya dibutuhkan partisipasi anggota menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha jika

memperhatikan pertambahan pendapatan anggota dan pertumbuhan usaha anggota. Dasori, et.al (2002) menegaskan bahwa kinerja kelembagaan sosial ekonomi dalam keberlanjutannya harus berfokus pada penciptaan lingkungan hidup dan memungkinkan beradaptasi dengan masyarakat berbasis sumber daya alam. Artinya bahwa kinerja kelembagaan dalam keberlanjutannya harus berfokus pada penciptaan sinergitas adaptasi masyarakat dengan lingkungan. Fakta ini menegaskan bahwa membentuk kinerja kelembagaan diperlukan pertambahan pendapatan dan jumlah anggota, pertambahan sisa hasil usaha, dan pertumbuhan usaha. Rubach M. (1997) menyebutkan bahwa potensi membentuk kekuatan lembaga adalah (1) pemilik berperan aktif dalam urusan strategis kelembagaan, (2) pemilik membentuk mekanisme membangun hubungan, dan (3) peran para pemegang saham. Fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan usaha yang dijalankan lembaga, pertambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi memberi kontribusi kinerja kelembagaan mencapai kesejahteraan anggot koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh bertambahnya pendapatan, sisa hasil usaha meningkat serta bertambahnya usaha dan bertambahnya jumlah anggota terhadap kinerja lembaga koperasi.

Hal itu sejalan yang dikemukakan oleh Moehersono, (2012), Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi.

Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya Robbins (2008) mengemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk itu dalam memperbaiki kinerja pengurus koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit diantaranya adalah semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah mengelola koperasi (*agent*) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai pihak pemberi amanah (*principal*).

Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Namun demikian secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya yang kinerjanya belum seperti yang kita harapkan. Koperasi pada kategori inilah yang memberi beban psikis dan juga trauma bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi.

Koperasi juga diharapkan dapat berperan serta dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini eksistensi koperasi

untuk mampu bertahan dalam menghadapi persaingan serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya tidak terlepas dari kinerja lembaga yang dibangun melalui perkembangan usaha dan pangsa pasar serta peningkatan penghasilan usaha anggota, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.

Untuk memperbaiki sehat organisasi koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit; diantaranya adalah semua aktivitas anggota, pengurus dan pengawas yang telah diberi amanah mengelola koperasi harus mematuhi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan bersama-sama berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap kinerja lembaga koperasi. Pengurus koperasi lebih aktif memperoleh dana dan melakukan perputaran dana seefektif mungkin untuk mengembangkan usaha-usaha yang produktif serta memperluas pangsa pasar. Adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu bersaing dengan usaha-usaha lain di luar koperasi. Untuk itu perencanaan dan pembuatan studi kelayakan usaha akan membantu dalam pelaksanaan usaha yang lebih kreatif. Agar senantiasa melaksanakan evaluasi pengembangan model program pelatihan usaha yang berorientasi kreatif dan inovatif dalam pengembangan kompetensi SDM, Dinas terkait sebagai pembina senantiasa menyediakan

pendampingan dan bimbingan dan berperan aktif dalam pelaksanaan RAT serta melakukan kajian mendalam dan selektif terhadap pendirian koperasi, Dekopin diharapkan dapat membangun sistem sentralistik potensi ekonomi Koperasi/Anggota Koperasi berbasis IT dan memantau perkembangan koperasi secara online.[]

BAB IV

MODEL KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI PESISIR

4.1. Deskriptif Sehat Organisasi

Koperasi pesisir pada wilayah Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Secara administratif di Kota Makassar adalah, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Tamalate. Kabupaten Pangkep, yakni Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, dan Kecamatan Labbakkang. Kabupaten Takalar pada lokasi Kelurahan Galesong Utara dan Galesong Selatan. Penelitian ini menitikberatkan pada “Pengaruh Sehat Kelembagaan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan)” dengan mengkaji variabel sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha, kompetensi sumber daya manusia, kinerja lembaga koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi.



Persepsi responden terhadap sehat organisasi dengan indikator melaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun, tingkat kehadiran anggota jika diundang rapat, tingkat keterlibatan dan partisipasi anggota memberikan gagasan/ide dalam rapat, aktivitas pengurus dan anggota koperasi mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, tingkat kepatuhan pengurus dan anggota pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, tingkat pelaksanaan pertanggungjawaban anggota koperasi atas pekerjaan yang diberikan, tingkat pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap transparansi laporan, tingkat partisipasi anggota atas kemajuan koperasi dan tingkat partisipasi terhadap kinerja koperasi.



Dari 9 indikator tersebut dari 270 responden, rata-rata menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,3%, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa kehadiran koperasi hanya sebatas pada upaya untuk mendapatkan pinjaman, selain itu disebabkan oleh belum kuatnya kesadaran pada pentingnya koperasi sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir dan ini sebagai konsekuensi dari sosialisasi koperasi yang belum mendasar. Selain itu, terdapat 27 responden atau 9,9% yang menilai sembilan (9) indikator sehat organisasi yang menyatakan jarang berpartisipasi sebagai anggota koperasi, artinya fakta penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran anggota lebih didasarkan pada situasional sesuai dengan adanya alokasi waktu pada saat tidak ada kegiatan di dalam mencari nafkah, selanjutnya terdapat 53 atau 19,5% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat organisasi

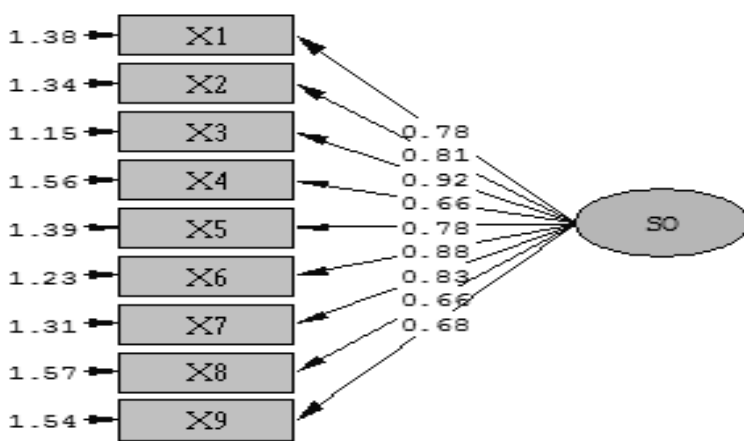
yang mengatakan kadang kala berpartisipasi sebagai anggota koperasi, fakta penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran anggota tidak berarti dan tidak mempengaruhi organisasi, sehingga lebih memilih melakukan aktivitas lain, terdapat 90 atau 33% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat organisasi yang menjawab sering berpartisipasi sebagai anggota koperasi, fakta penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran dalam organisasi memberi manfaat sebagai anggota,

Selanjutnya anggota dapat memberi kontribusi atas kemajuan koperasi dan 97 atau 35,9% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat organisasi yang menjawab selalu berpartisipasi sebagai anggota koperasi, fakta penelitian ini menjelaskan bahwa kepedulian dan rasa memiliki sebagai anggota koperasi cukup tinggi, anggota koperasi menyadari bahwa adanya pembagian kerja yang jelas dengan tanggung jawab yang diberikan, pengurus dan anggota konsisten melaksanakan RAT setiap tahun akan membawa organisasi koperasi mencapai tujuannya, yakni kesejahteraan anggota.

Model Pengukuran Sehat Organisasi

Model pengukuran Sehat Organisasi ditentukan berdasarkan besarnya nilai kontribusi dari masing-masing dimensi atau faktor yang membentuk variabel laten atau konstruk. Adapun variabel manifes dari Sehat Organisasi memiliki tiga dimensi, adalah Rapat Keanggotaan,

Penetapan AD & ART, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus selanjutnya masing-masing dimensi memiliki tiga indikator, sehingga jumlah indikator seluruhnya untuk variabel Sehat Organisasi sebanyak 9 indikator. Adapun hubungan dimensi dalam membentuk variabel Sehat Organisasi seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Diagram Jalur Model Sehat Organisasi

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Sehat Organisasi, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X₃ (keterlibatan dalam rapat anggota), X₆ (bertanggung jawab dalam bekerja pada lingkungan organisasi).

4.2. Deskriptif Variabel Sehat Financial

Untuk memahami eksistensi anggota koperasi, dilakukan kajian secara mendalam tentang variabel sehat *financial* berdasarkan hasil kuesioner terhadap anggota koperasi sebagai sampel dalam kajian penelitian ini. Persepsi responden dan model pengukurannya dijelaskan di bawah ini. Fakta hasil penelitian terhadap Persepsi responden variabel sehat *financial* terdapat 270 responden dengan 9 (sembilan) indikator.

Persepsi responden terhadap sehat *financial* dengan indikator tingkat keaktifan pengurus melakukan perputaran dana, melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional koperasi, melaksanakan evaluasi pendanaan, pengurus senantiasa melaporkan jasa simpana, melaporkan perkembangan penggunaan dana, melaksanakan pelaporan perputaran dana, peningkatan perkembangan usaha, peningkatan pertumbuhan usaha koperasi, dan peningkatan jumlah pembagian SHU anggota. Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,5%, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa ketidak seriusan pengurus koperasi menggunakan dana yang ada pada pengembangan usaha, selain itu ketidak mampuan mengelola keuangan sebagai upaya peningkatan sisa hasil usaha, selain itu terdapat 40 responden atau

14,9% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat *financial* yang menyatakan jarang, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pendanaan koperasi tidak optimal melaksanakan evaluasi dan kurang efektif dalam pembiayaan operasional koperasi.

Selain itu, terdapat 68 responden atau 25,1% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat *financial* yang menyatakan kadang kala melaksanakan pelaporan pendanaan dan simpanan di koperasi, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa transparansi pendanaan dan simpanan pada koperasi kurang maksimal memanfaatkan dana yang ada, sehingga pertumbuhan usaha koperasi dan peningkatan SHU belum sesuai yang diharapkan anggota. Selanjutnya terdapat 95 responden atau 35,1% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat *financial* mengatakan sering, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa keaktifan melaksanakan perputaran dana dan mengevaluasi penggunaannya dari pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi memberi arti pemanfaatan dana koperasi memenuhi harapan anggota. dan terdapat 63 responden atau 23,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator menjawab selalu, fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pelaporan jasa simpanan, pembagian SHU anggota yang diterima memberi motivasi untuk aktif

mengembangkan koperasi pada wilayah pesisir sebagai bagian dari upaya memperbaiki kehidupannya dan masyarakat pada umumnya.

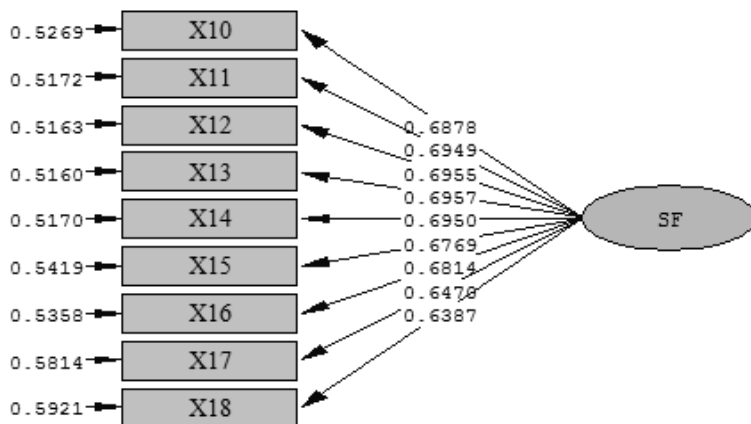


Model Pengukuran Sehat *Financial*

Model pengukuran Sehat *Financial* ditentukan berdasarkan besarnya nilai kontribusi dari masing-masing dimensi atau faktor yang membentuk variabel laten atau konstruk, yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu: Perncaanaan Anggaran, Laporan

Keuangan, dan Sisa Hasil Usaha. Selanjutnya masing-masing dimensi memiliki tiga indikator, sehingga jumlah indikator seluruhnya untuk variabel Sehat *Financial* sebanyak 9 indikator. Adapun hubungan dimensi dalam

membentuk variabel Sehat *Financial* seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Diagram Jalur Model Sehat *Financial*

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Sehat *Financial*, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X₁₃ (Laporan Jumlah Simpanan), X₁₂ (Pemantauan dan Evaluasi), dan X₁₀ (Proses Perputaran Dana).

4.3. Deskriptif Sehat Usaha

Persepsi responden terhadap variabel sehat usaha dilakukan kajian berdasarkan hasil kuesioner terhadap anggota koperasi sebagai sampel dalam kajian penelitian

ini. Persepsi responden dan model pengukurannya dijelaskan di bawah ini. Fakta hasil penelitian terhadap Persepsi responden variabel sehat usaha terdapat 270 responden dengan 9 (sembilan) indikator.



Persepsi responden terhadap sehat usahadengan indikator keterbukaan pengurus melayani konsultasi anggota, pelaksanaan layanan usaha anggota, pelaksanaan layanan kebutuhan atau pinjaman anggota, partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha, partisipasi anggota membangun dan mengembangkan kerjasama, partisipasi dan kerjasama anggota membuat perencanaan usaha, partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha, peran anggota membuat perencanaan strategi usaha, dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha.

Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat usaha yang menyatakan tidak pernah, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa koperasi tidak memberi ruang konsultasi layanan, baik pinjaman maupun layanan usaha, sehingga tingkat partisipasi anggota lebih didasarkan pada situasional sesuai dengan keinginannya memanfaatkan peluang usaha pada koperasi. Selain itu, terdapat 37 responden atau 13,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat organisasi yang menyatakan jarang, hal ini menunjukkan fakta hasil penelitian yang menjelaskan bahwa usaha koperasi hanya sebatas membuat rencana dan strategi usaha, belum optimalnya menumbuh kembangkan usaha dan kerjasama anggota maka koperasi sebagai soko guru perekonomian menjadi rapuh.

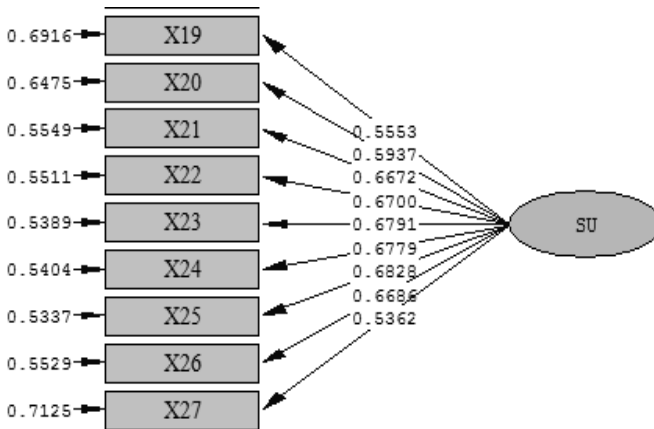
Terdapat 67 responden atau 24,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat usaha yang menjawab kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa perencanaan menyusun strategi usaha akan menemukan peluang usaha koperasi lebih berkembang, namun ketidak keterbukaan pengurus koperasi membangun kerjasama dengan anggota maka usaha koperasi berjalan di tempat, selain itu, terdapat 91 responden atau 33,8% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat usaha yang menjawab sering,

fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keterbukaan pengurus melayani konsultasi usaha, membangun kerjasama terhadap perkembangan usaha menunjukkan kemampuan koperasi memberdayakan sumber daya yang ada. Dan 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator menjawab selalu, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa peran dan partisipasi anggota koperasi membangun kerjasama merencanakan usaha, menemukan usaha serta melayani kebutuhan anggota, hal itu mencerminkan usaha koperasi tumbuh dan berkembang memberi kesejahteraan anggota.

Model Pengukuran Sehat Usaha

Model pengukuran Sehat Usaha ditentukan berdasarkan besarnya nilai kontribusi dari masing-masing dimensi atau faktor yang membentuk variabel laten atau konstruk, yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu: Pelayanan Usaha, Studi Kelayakan Usaha, dan

Laporan Perkembangan Usaha. Selanjutnya hubungan dimensi dalam membentuk variabel Sehat Usaha dapat dilihat pada gambar gambar di bawah ini:



Gambar 3.. Diagram Jalur Model Sehat Usaha

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Sehat Usaha, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X₂₅ (Laporan Pengembangan Usaha), dan X₂₃ (Strategi Peningkatan Kerja Sama).

4.4. Deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia

Persepsi responden terhadap variabel kompetensi SDM dilakukan kajian berdasarkan hasil kuesioner terhadap anggota koperasi sebagai sampel dalam kajian penelitian ini. Persepsi responden dan model pengukurannya dijelaskan di bawah ini. Fakta hasil

penelitian terhadap Persepsi responden terdapat 270 responden dengan 9 (sembilan) indikator.

Persepsi responden terhadap kompetensi sumber daya manusia dengan indikator pengembangan program pelatihan, pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, evaluasi pengembangan program pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha, pengawasan kegiatan pelatihan usaha, evaluasi hasil kegiatan pelatihan, pengembangan model pelatihan berbasis teknologi ($X_{4.7}$), pengembangan model pelatihan berbasis UKM, pengembangan model pelatihan berorientasi kreatif dan inovatif.

Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa koperasi hanya sebatas pada upaya pendiriannya atau pembentukannya, selain itu belum berorientasi pengembangan program pelatihan pada pentingnya koperasi mengembangkan model pelatihan sebagai dasar pembentukan kompetensi sumber daya di dalamnya.

Selanjutnya terdapat 39 responden atau 14,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia menjawab jarang, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa pengembangan model pelatihan

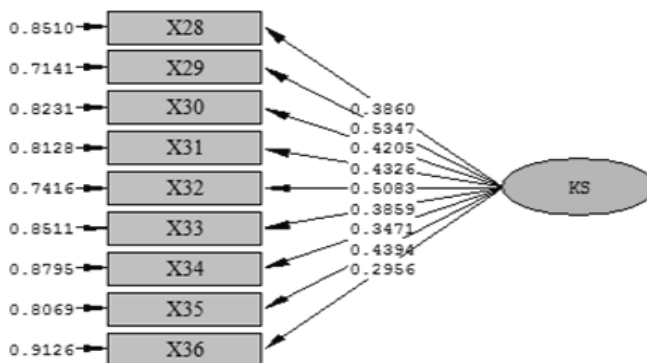
adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral anggota sesuai kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan, akan tetapi konsep tersebut belum menunjukkan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat 64 responden atau 23,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia menyatakan kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa peningkatan model pelatihan memberi pemahaman pengetahuan dan keahlian untuk menggerakkan suatu pekerjaan, baik kualitas maupun kuantitas, namun kesadaran pengurus koperasi belum optimal pada pentingnya mengembangkan model pelatihan berbasis inovatif.

Terdapat 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia menjawab sering, hal ini memberi fakta hasil penelitian bahwa pengembangan program pelatihan model simulasi dalam bentuk peran berbasis UKM akan memungkinkan profesionalisme sumber daya di dalamnya menghasilkan kinerja koperasi. Dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia menjawab selalu, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan, meningkatkan keahlian dan kecakapan, antara

lain; melalui *on the job training* belajar dan meniru suatu pekerjaan dibawa bimbingan dan pengawasan, *demonstration and example* dengan metode latihan yang dilakukan dengan peragaan dan penjelasan melalui contoh serta simulasi berorientasi kreatif dan inovatif memberi arti terciptanya kompetensi sumber daya manusia dalam koperasi.

Model Pengukuran Kompetensi SDM

Model pengukuran variabel Kompetensi SDM ditentukan melalui besarnya kontribusi dari masing-masing dimensi atau faktor yang membentuk variabel laten atau konstruk, yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu: Program Pendidikan dan Pelatihan, Pelaksanaan Program Pelatihan, dan Pengembangan model Pelatihan. Selanjutnya hubungan dimensi dalam membentuk variabel Kompetensi SDM dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Diagram Jalur Model Kompetensi SDM

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kompetensi SDM, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X_{29} (simulasi pelatihan usaha) dan X_{32} (Pengawasan Kegiatan Pelatihan Usaha).

4.5. Analisis Deskriptif Kinerja Koperasi

Persepsi responden variabel kinerja koperasi, terdapat 270 responden menilai sembilan indikator. Persepsi responden terhadap kinerja lembaga koperasidengan indikator pertumbuhan usaha yang dijalankan koperasi, penambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, tingkat penambahan jumlah anggota koperasi tingkat pertambahn penyertaan modal anggota, tingkat penambahan pendapatan anggota, tingkat perkembangan SHU, tingkat efisiensi pengelolaan SHU, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu.



Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan koperasi hanya sebatas menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga koperasi, selain itu disebabkan oleh belum kuatnya kesadaran koperasi pada pentingnya mengembangkan usaha, pentingnya penyertaan modal anggota, dan pentingnya penambahan jumlah anggota sebagai ukuran terwujudnya kinerja kelembagaan koperasi sebagai konsekuensi jati diri berkoperasi.

Selain itu, terdapat 34 responden atau 12,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan jarang, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa lembaga koperasi lebih didasarkan pada ketidak efisiensinya mengelola usaha koperasi dan mengelola SHU, padahal kinerja merupakan tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan dan bagaimana cara mengerjakannya. Terdapat 69 responden atau 25,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan kelembagaan koperasi hanya sebatas penambahan penyertaan modal anggota belum sepenuhnya

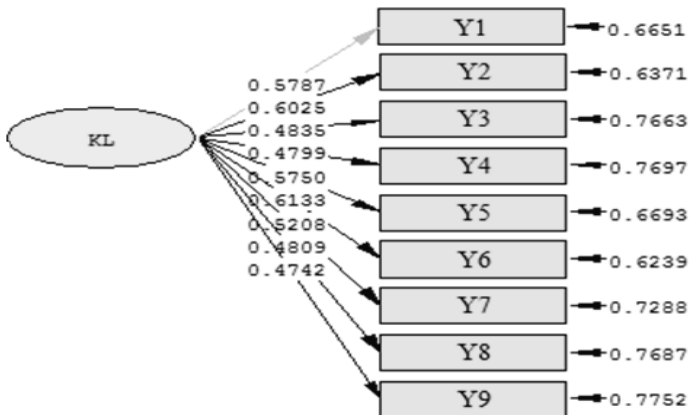
didasarkan pada kinerja lembaga yang merupakan jawaban dari berhasilnya tujuan lembaga koperasi. Selanjutnya 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan sering, Fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bertambahnya anggota koperasi serta bertambahnya penyertaan modal koperasi dari anggota mengindikasikan adanya kepercayaan mengelola usaha koperasi dan ketetapan mengelola SHU, dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan sering, fakta ini memberi informasi bawa pertumbuhan dan perkembangan usaha dan jumlah anggota meningkat serta penyertaan modal meningkat, hal ini mengindikasikan kinerja lembaga koperasi telah melaksanakan kewajibannya dalam penetapan pembagian SHU yang sudah ditetapkan sebagai berikut;

- 1) Untuk jasa anggota adalah sebesar 45% terdiri dari 20% untuk jasa modal dan 25% untuk jasa peminjaman.
- 2) Untuk jasa cadangan adalah sebesar 25%.
- 3) Untuk jasa pengurus adalah sebesar 10%.
- 4) Untuk dana pendidikan adalah sebesar 5%.
- 5) Untuk dana sosial adalah sebesar 5%.
- 6) Untuk dana kesejahteraan pegawai adalah sebesar 5%.

- 7) Untuk dana pembangunan daerah kerja sebesar 5%, memberi menjawab selalu.

Model Pengukuran Model Pengukuran Kinerja Lembaga Koperasi

Model pengukuran variabel Kinerja Lembaga Koperasi terdiri dari tiga dimensi, yaitu: Perkembangan Usaha, Perkembangan Jumlah Anggota, dan Pengembangan SHU. Selanjutnya hubungan dimensi dalam membentuk variabel Kinerja Lembaga Koperasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Diagram Jalur Model Kinerja Lembaga Koperasi

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kinerja Lembaga Koperasi, terdapat beberapa variabel manives

yang memiliki kontribusi yang dominan, yaitu: Y_6 (Pertambahan Pendapatan Anggota) dan Y_2 (Hasil Usaha Dalam Kurun Waktu Tertentu).

4.6. Analisis Deskriptif Kesejahteraan Anggota

Terdapat 270 responden yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi. Persepsi responden terhadap kesejahteraan anggota kopersidengan indikator peluang membiayai pendidikan anggota koperasi, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti jenjang pendidikan anggota, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kursus keterampilan, kelancaran usaha anggota, tingkat produktivitas usaha anggota, perkembangan pangsa pasar, peningkatan volume usaha, peningkatan volume penjualan, dan peningkatan penghasilan usaha anggota.

Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab tidak pernah, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa keberadaan koperasi belum memberikan peluang kepada anggota dalam memenuhi kebutuhannya sebagai anggota koperasi, selain itu terdapat 34 responden atau 12,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab jarang, fakta ini

menjelaskan bahwa belum optimalnya pengurus koperasi memperluas pangsa pasar atas usaha yang dikelola koperasi.

Terdapat 69 responden atau 25,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan koperasi untuk mensejahterakan anggota terkadang terhalang oleh tingkat produktivitas usaha, sehingga peluang mendapatkan pasar belum memenuhi harapan anggota walaupun disadari bahwa perluasan pasar akan mengakibatkan peningkatan volume penjualan yang pada gilirannya koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota,

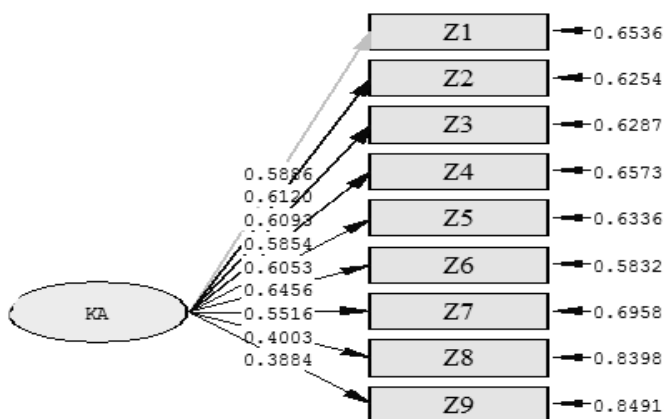
Selanjutnya terdapat 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab sering, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa koperasi sudah mampu meningkatkan volume usaha dan mendapatkan peluang pasar, sehingga koperasi memiliki peluang mensejahterakan anggota melalui kemampuannya membiayai pendidikan dan kursus-kursus demi kemajuan koperasi pesisir yang lebih baik dalam pengelolaannya.

Dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab selalu. Fakta hasil penelitian ini menjelaskan

bahwa peluang anggota sudah mampu membiayai pendidikan keluarganya sebagai akibat berhasilnya koperasi pada wilayah pesisir, serta tingkat kelancaran usaha anggota dan penguasaan pasar, sehingga pendapatan koperasi meningkat termasuk anggota koperasi menunjukkan tercapainya tingkat kesejahteraan anggota koperasi.

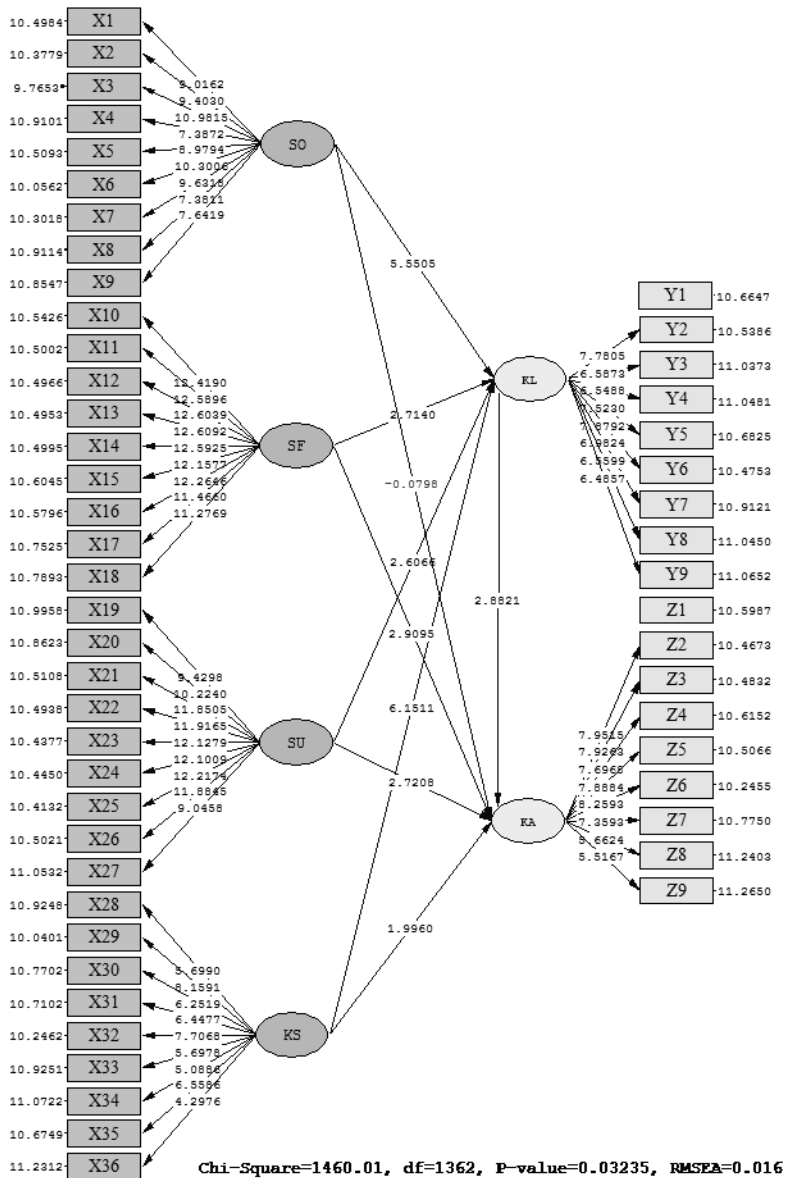
Model Pengukuran Kesejahteraan Anggota

Model pengukuran variabel Kesejahteraan Anggota terdiri dari tiga dimensi, yaitu: Kesempatan Mengikuti Pendidikan, Perkembangan Usaha Anggota, dan Perkembangan Profitabilitas Usaha. Selanjutnya hubungan dimensi dalam membentuk variabel Kinerja Lembaga Koperasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Diagram Jalur Model Kesejahteraan Anggota

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kesejahteraan Anggota, terdapat beberapa variabel manives yang memiliki kontribusi yang dominan, yaitu: Z_6 (Luas Pasar/perkembangan pangsa pasar), bahwa pengelolaan koperasi hendaknya memperluas pangsa pasar, sehingga koperasi dikenal luas, Z_2 (Kebutuhan Pendidikan), bahwa keberhasilan koperasi jika anggota yang terlibat di dalamnya sudah mampu membiayai keluarganya utnuk melanjutkan pendidikannya, dan Z_3 (Kebutuhan Keterampilan) bahwa koperasin dapat berkembang jika pengurus dan anggota memilii keahlian mengembangkan koperasi, khususnya koperasi pada wilayah pesisir oleh karena koperasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat. Dari model pengukuran tersebut, sehingga pengukuran *full model* sebagai berikut :



Gambar 5.8 Diagram Jalur Full Model Berdasarkan Nilai T

BAB V
IMPLIKASI KINERJA
KELEMBAGAAN KOPERASI
WILAYAH PESISIR

5.1. Implikasi Organisasi

Selama ini koperasi mampu eksis dalam menjaga dan mempertahankan kesejahteraan anggotanya bukan karena tingkat kesehatan organisasi, melainkan karena didukung oleh tingkat kesehatan keuangan, tingkat kesehatan usaha, dan kompetensi SDM serta kinerja lembaga. Untuk membentuk kinerja lembaga koperasi dalam mencapai kesejahteraan anggota diperlukan indikator senantiasa melaksanakan RAT setiap tahun supaya dapat dievaluasi kemajuan koperasi, selain itu seluruh anggota koperasi wajib hadir jika diundang rapat dan diharapkan keterlibatannya berpartisipasi memberikan ide atau gagasan dan seluruh aktivitas koperasi merujuk serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang sudah ditetapkan, anggota bertanggung jawab jika diberikan tugas untuk kemajuan koperasi sebagai bahagian partisipasi mencapai kinerja koperasi. Charles B.Lowry and Paul J.

Hanges, (2008) mengatakan konsep organisasi yang sehat merupakan salah satu yang memiliki profil yang di dalamnya beberapa iklim dimensi bekerja untuk menjaga sinergitas organisasi dan daya tanggap lembaga. Organisasi yang sehat melakukan kebijakan, praktik, dan prosedur yang memberdayakan karyawan dan hanya menekankan pentingnya terus menerus pembelajaran dan inovasi yang bersifat timbal balik untuk memenuhi tuntutan tersebut dari sebuah lingkungan yang selalu berubah, hal itu semua akan menentukan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dari indikator yang telah disebutkan di atas dalam membentuk sehat organisasi yang memiliki kontribusi terbesar pengaruhnya adalah senantiasa melibatkan anggota koperasi dalam setiap pelaksanaan rapat. Torca, Nicole; Looise, (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam organisasi adalah kunci utama memberikan kontribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif.

5.2. Implikasi *Financial*

Selain kompetensi SDM dan kesehatan organisasi, turut memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja lembaga koperasi adalah kesehatan *financial* dengan 9 (sembilan) indikator, yakni tingkat keaktifan pengurus melakukan perputaran dana, melaksanakan kegiatan

pembiayaan operasional koperasi, melaksanakan evaluasi pendanaan, pengurus senantiasa melaporkan jasa simpanan, melaporkan perkembangan penggunaan dana, melaksanakan pelaporan perputaran dana, peningkatan perkembangan usaha, peningkatan pertumbuhan usaha koperasi, dan peningkatan jumlah pembagian SHU anggota.

Untuk itu, salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja koperasi dapat dilihat dari kemampuan dan kesehatan keuangannya bahwa sehatnya keuangan koperasi jika pengurus optimal memanfaatkan dana yang ada untuk menumbuh kembangkan usaha oleh karena akan berdampak pada pendapatan koperasi yang meningkat, sehingga pembagian SHU anggota juga meningkat.

Oleh karena itu, dari 9 (sembilan) indikator tersebut di atas yang dapat memberikan kontribusi terbesar adalah anggota sangat menginginkan dalam kepengurusan koperasi hendaknya anggota yang terlibat dalam koperasi untuk aktif menyimpan dananya secara sukarela dan anggota mengharapkan kepada pengurus koperasi agar senantiasa melaporkan secara terbuka atas dana yang tersimpan dari anggota, sehingga dana koperasi dapat meningkat untuk dapat dikembangkan perputarannya untuk membiayai usaha-usaha koperasi dan biaya operasional demi sehatnya pengelolaan keuangan koperasi. Keberadaannya sebagai

anggota koperasi dilayani dengan baik setiap saat oleh pengurus jika mereka membutuhkan dana untuk membuka usaha-usaha lain untuk kebutuhan keluarganya dan diberi peran dalam menyusun rencana dan strategi usaha, sehingga dalam rapat anggota tahunan mereka puas atas laporan perkembangan usaha koperasi.

Sejalan yang dijelaskan Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart. (2005) bahwa pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik. Untuk itu Aktivitas manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan bersifat positif variabel sehat finansial terhadap kinerja lembaga koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

5.3. Implikasi Sehat Usaha

Dalam menilai kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota diperlukan sehat usaha.

Bagi organisasi yang sudah mapan ataupun belum tidak terkecuali koperasi sebagai badan usaha dituntut agar melakukan pengembangan usaha terus menerus guna mengantisipasi terjadinya kondisi persaingan usaha yang setiap saat mengalami perubahan. Untuk itu dalam mencapai sehat usaha diperlukan indikator-indikator, yakni; keterbukaan pengurus melayani konsultasi anggota, pelaksanaan layanan usaha anggota, pelaksanaan layanan kebutuhan atau pinjaman anggota, partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha, partisipasi anggota membangun dan mengembangkan kerjasama, partisipasi dan kerjasama anggota membuat perencanaan usaha, partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha, peran anggota membuat perencanaan strategi usaha, dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha.

Oleh sebab itu, dari hasil kajian menjelaskan bahwa, indikator yang memiliki konstibusi terbesar pengaruhnya untuk membetuk sehat usaha adalah pengembangan usaha dan selanjutnya strategi peningkatan kerja sama. Hal itu sejalan dengan penjelasan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan bahwa sejatinya, koperasi harus menjadi dirinya sendiri, mampu berinisiatif menjalin kerjasama dengan siapapun. Koperasi harusnya jadi tumpuan di tengah dominasi pemilik modal, gurita

korporasi dan birokrasi yang membatasi kreasi. Untuk Sulsel, sesuai dengan prinsip pendiriannya, koperasi yang ada harusnya merupakan pililhan bagi para produsen seperti petani dan nelayan maupun penyedia jasa seperti transportasi darat, udara, laut dan lain sebagainya untuk dijadikan wadah bersama dalam dimensi yang luas. Bukan semata aspek keuangan tetapi kekuatan kerjasama dan kegotongroyongan.

Tantangan yang dihadapi koperasi di Sulsel tak melulu berkaitan permodalan besar tetapi komitmen memajukan koperasi dari dalam; soliditas kerjasama dan tolong menolong. Faktor globalisasi, perdagangan bebas harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan. Diperlukan langkah-langkah strategis menguatkan organisasi berbasis ekonomi ini, yang amat vital adalah adanya fasilitator atau pendamping yang dapat meyakinkan warga tentang urgensi berkoperasi, sebagai jawaban atas masa depan mereka yang mulai samar karena krisis multidimensi. Pemerintah harusnya menjalankan program yang tak sekadar menambah kuantitas koperasi tetapi membangun kesadaran kolektif seperti yang diharapkan Bung Hatta. Mimpi besar Pemprov. Sulsel untuk menjadikan Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional sekaligus simpul jejaring kesejahteraan masyarakat mungkin akan tercapai jika mampu menangani unsur-unsur

pembangunan seperti yang disebutkan sebelumnya, unsur penting seperti norma atau nilai-nilai kegotong royongan, tolong menolong dan menguatkan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi. Memampukan mereka untuk tahu dan terampil serta berwatak positif dalam mengelola sumberdaya alam, produksi dan jasa. Selain itu, penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran produk koperasi juga amat dibutuhkan bersama penerapan manajemen modern. Gagasan menata koperasi telah menjadi agenda Pemerintah. AM Yamin (2013).

5.4. Implikasi Kompetensi SDM

Dari semua variabel konstruk yang independen paling dominan memiliki kontribusi pengaruh langsung terhadap tingkat kinerja lembaga adalah: variabel kompetensi SDM dan diikuti dengan sehat organisasi. Kedua variabel tersebut selama ini memberi kontribusi terbesar dalam membangun kinerja lembaga koperasi di tiga kota/kabupaten, yaitu kotaMakassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar melalui dimensi Kompetensi SDM. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan meningkatkan kompetensi SDM dengan indikator pengembangan program pelatihan, pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, evaluasi pengembangan program pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha, pengembangan

model pelatihan berbasis teknologi, berbasis UKM dan berorientasi kreatifitas dan inovatif akan mengantar kompetensi SDM koperasi. Dan dari indikator tersebut yang memiliki kontribusi terbesar pengaruhnya adalah pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, bahwa bukan lagi saatnya lebih banyak mengutamakan seminar-seminar program pelatihan akan tetapi responden lebih tertarik jika pelaksanaan pelatihan dalam bentuk tehnis, artinya lebih senang dengan simulasi sambil praktek peran sebagai pengusaha dan setiap pelatihan dievaluasi kemajuannya, hal itu lebih memungkinkan dan lebih cepat memahami kompetensinya.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan menejerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun *networking*, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi optimalisasi pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja. Sejalan yang dikemukakan oleh Tjahjono Widarmanto (2008) bahwa kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan potensinya sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Oleh sebab itu

betapa pentingnya kompetensi SDM dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota koperasi sebab selama ini tidak sedikit koperasi tidak mampu bertahan disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi SDM.

5.5. Implikasi Kinerja Kelembagaan

Pengembangan kinerja lembaga koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil kajian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dan bersifat positif variabel kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota. Untuk membentuk kinerja lembaga koperasi diperlukan indikator-indikator pertumbuhan usaha koperasi, penambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, tingkat penambahan jumlah anggota koperasi, tingkat penambahan penyertaan modal anggota, tingkat penambahan pendapatan anggota, tingkat perkembangan SHU, tingkat efisiensi pengelolaan SHU, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu. Dari indikator-indikator yang membentuk kinerja lembaga koperasi terdapat indikator yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah penambahan pendapatan anggota dan Sisa Hasil Usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu diterima tepat waktu.

Hal itu sejalan yang dikemukakan oleh Moeheriono, (2012), Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi.

Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya Robbins (2008) mengemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk itu dalam memperbaiki kinerja pengurus koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit diantaranya adalah semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah mengelola koperasi (*agent*) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai pihak pemberi amanah (*principal*).

Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Namun demikian secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya yang kinerjanya belum seperti yang kita harapkan. Koperasi pada kategori inilah yang memberi beban psikis dan juga trauma bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi.

5.6. Implikasi Kesejahteraan Anggota Koperasi

Koperasi diharapkan dapat berperan serta dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama

atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini eksistensi koperasi untuk mampu bertahan dalam menghadapi persaingan serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya tidak terlepas dari kinerja lembaga yang dibangun melalui perkembangan usaha dan pangsa pasar serta peningkatan penghasilan usaha anggota, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya. Demikian halnya jika memperhatikan hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan anggota disebabkan oleh kinerja lembaga baik secara langsung maupun sebagai perantara dari tingkat kesehatan organisasi, kesehatan *financial*, kesehatan usaha, dan tingkat kompetensi lembaga terhadap tingkat kesejahteraan anggota menjadi hal penting bagi pengembangan koperasi di masa datang.

Berdasarkan Visi, Misi dan Prioritas RPJMD Sulawesi Selatan khususnya terkait uraian 11 (sebelas) program prioritas Gubernur dalam RPJMD 2013-2018, maka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya percepatan untuk mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan. Maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 menekankan pada beberapa prioritas pembangunan antara lain yaitu; Mengefektifkan

Kelembagaan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat, Penguatan Ekonomi. Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai tentang efektivitas kelembagaan berbasis masyarakat adalah antara lain sebagai berikut: 1) Meningkatnya jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM; 2) Meningkatnya jumlah promosi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha, 3) Jumlah SDM pelaku UKM serta Koperasi yang mengikuti Diklat; 4) Jumlah UMKM Mandiri, 5) Jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank, 6) Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasarana dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM.

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 menjelaskan bahwa hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis, sebanyak 6 Sasaran Strategis dengan capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik, yakni meningkatnya mutu dan produksi hasil pertanian, terdorongnya industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, meningkatnya kualitas dan meluasnya kesempatan kerja, terluasnya infrastruktur wilayah dan ketersediaan energy, menguatnya ekonomi wilayah dan

meningkatnya produksi berbasis masyarakat, dan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan gerakan susel hijau. Sebanyak 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori Baik, yakni meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar dan 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori Cukup, yakni kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, fakta kajian ini memberi informasi bahwa sehat organisasi kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat. Selanjutnya sehat *financial* kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberi informasi bahwa sehat *financial* kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan kurang sehat.

Kualitas sehat usaha kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberi informasi bahwa sehat usaha kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat. Untuk kompetensi SDM

kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberi informasi bahwa kompetensi SDM kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat.

Kinerja kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberi informasi bahwa kinerja kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat dan mendekati sehat dan kesejahteraan anggota koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberi informasi bahwa kesejahteraan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat dan mendekati sehat.

Torres-Lara, Ricardo. 2001, menjelaskan dalam penelitiannya bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dari organisasi koperasi adalah sejumlah aturan operasional pengelolaan sumber daya alam. McNamara, Madeleine Wright. (2008) berfokus pada kajian penyelidikan empiris adanya interaksi dari berbagai jenis kontribusi

multiorganizational, penerapan kebijakan, kolaborasi, koordinasi kerja sama, pengaturan multiorganizational, dan jaringan. Ketut Gunawan, (2009). Menjelaskan bahwa faktor kinerja organisasi lembaga koperasi, fokus penelitiannya adalah aspek perspektif pembelajaran yang meliputi: pemberdayaan karyawan dan akuntabilitas personal; aspek perspektif finansial yang meliputi: Pertumbuhan pendapatan; aspek perspektif pelanggan yang meliputi: jumlah pelanggan baru dan kesetiaan pelanggan; aspek perspektif bisnis internal yang meliputi: kemampuan inovasi dan Margaret Setyowati Iin Indarti, 2011. Aspek permodalan, Aspek kualitas aktiva, Aspek manajemen, Aspek efisiensi, Aspek likuiditas, Aspek kemandirian, Aspek jati diri koperasi.

Dalam kajian ini menjelaskan bahwa untuk menilai kinerja kelembagaan koperasi diperlukan sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha dan kompetensi SDM.. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kondisi sehat kelembagaan koperasi dapat diukur apabila ada indikator-indikator yang mempengaruhinya sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Jika dianalisis kinerja koperasi di 3 daerah pesisir di Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Takalar. Koperasi pada wilayah pesisir Kota Makassar memiliki nilai korelasi $r = 0,687$, koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nilai $r = 0,791$, dan koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Takalar dengan nilai $r = 0,795$.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Takalar lebih baik kinerja koperasi dibandingkan dengan Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar, alasannya adalah dari variabel eksogen sehat organisasi terhadap kinerja lembaga koperasi memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 0,609, sehat *financial* terhadap kinerja lembaga koperasi 0,685, sehat usaha terhadap kinerja lembaga koperasi 0,536, dan kompetensi SDM terhadap kinerja lembaga koperasi 0,774, artinya bahwa pengaruh yang kuat positif dan signifikan dari 4 variabel tersebut. Hal lain yang membuat koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Takalar yang baik adalah di Kabupaten Takalar terdapat tim RCDC (*Research and Community Development Centre*) yang secara khusus melakukan kegiatan dalam hal konsolidasi pembentukan koperasi, usaha-usaha perekonomian, pengadaan daya dukung teknologi terbarukan dan aktif melaksanakan pelatihan manajemen usaha, program pembentukan

karakter masyarakat dan terbukti pada tahun 2012 sebanyak 200 nelayan dan masyarakat pesisir di kabupaten Takalar mengikuti pelatihan manajemen koperasi di gedung Islamic Center Takalar dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat, antara lain melalui pelatihan manajemen usaha agar koperasi dan UMKM dapat dikelola dengan baik oleh para nelayan-nelayan sekitar.

Oleh sebab itu, untuk memperjelas kembali pemahaman-pemahaman mendasar tentang istilah-istilah operasional koperasi, berikut ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir, yakni keterbatasan akses informasi, akses pasar, sumber daya manusia, akses permodalan/pembiayaan, inovasi usaha dan tidak efektifnya penataan kelembagaan.
2. Koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana

memposisikan koperasi dalam system perekonomian nasional. Perspektif anggota menjadi peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi karena anggota sebagai *user* dan pemilik koperasi, hasil penilaiannya cukup baik berdasarkan peningkatan dalam memperoleh anggota baru dan koperasi juga mampu mempertahankan anggota lama yang dimiliki. Diakui memang, perkembangan koperasi masih menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan internal yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang menangani koperasi.

3. Milawaty (2011). Masalah utamanya sebenarnya bukanlah pada kuantitas koperasi itu sendiri, namun lebih pada kualitasnya. Terbukti selama berpuluh-puluh tahun lalu koperasi yang “mati suri” silih berganti muncul. Fungsi koperasi tidak dimaksimalkan. Yang ada justru penambahan koperasi tanpa dibarengi oleh kualitas. Koperasi sampai saat ini masih dibelenggu beragam persoalan klasik, di antaranya lemahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya modal, *networking*, dan pemasaran produk,
4. Oleh karenanya, meminjam opini Susidarto (www.sinarharapan.co.id), perketatan perizinan

pendirian koperasi harus dilakukan sejak dini agar koperasi yang berdiri bukan semata koperasi yang bersifat semu, yang hanya pandai menjajakan proposal dari tahun ke tahun agar bisa tetap eksis, melainkan koperasi yang mampu menjadi soko guru perekonomian. Langkah lainnya adalah kembali mengefektifkan lembaga pengawas koperasi. Selama ini fungsi pengawas koperasi tidak banyak berperan. Padahal, jabatan dan tugas mereka cukup berat dalam ikut mengawasi jalannya koperasi bersangkutan. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah memberi pendampingan kepada koperasi agar pengurus koperasi bisa menggunakan uangnya sesuai peruntukannya. Dengan pola-pola pendampingan semacam ini, bentuk penyimpangan akan dapat ditekan sekecil mungkin. Jika upaya-upaya di atas dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak yang berkepentingan, predikat kabupaten koperasi niscaya mampu dicapai daerah. Dengan demikian koperasi mampu duduk di tempat di mana dia semestinya berada.

5. Kesejahteraan adalah tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupann, oleh sebab itu dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai

dengan sumberdaya yang tersedia. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004).
3. Albert dan Hahnel (2005).Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu

classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahtraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasa sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

4. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2003) dalam Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial : Hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan.
5. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

6. Victor P.H. Nikijuluw, (2003) adalah populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang khas dalam membangun ekonomi maupun kelembagaan lokal sehingga mampu mandiri dan berlanjut. Kemajuan desa-desa merupakan dasar dari keberlanjutan bangsa sehingga diperlukan strategi makro dan mikro agar dicapai kemakmuran bagi masyarakat desa di segenap penjuru nusantara.
7. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang ada pada setiap individu yang berkaitan dengan efektivitas kinerja yang dia lakukan dalam setiap pekerjaan, baik dalam bertindak maupun dalam berpikir
8. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut yang ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar,
9. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.” dapat juga dipandang dari sisi relatif dan sisi absolut:

- Kemiskinan Relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu Negara pada waktu tertentu.
- Kemiskinan Absolut. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja
- Pengertian kemiskinan struktural seperti dikemukakan Suyanto menggambarkan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor tersebut utamanya ditengarai berasal dari

pemerintah dan struktur-struktur kekuasaan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Faktor-faktor penyebab dalam pengertian kemiskinan struktural antara lain kebijakan sosial yang tidak berpihak kepada masyarakat, penguasaan sumber daya secara berlebihan oleh pemerintah, pembangunan yang tidak dialokasikan secara adil dan terbatasnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berperan sebagai subyek dalam pembangunan.

- Orang miskin adalah mereka yang tetap atau sementara dalam keadaan lemah, tergantung dan remeh, dalam keadaan kekurangan yang berbeda-beda menurut zaman dan pola masyarakat serta dalam keadaan tak berdaya dan terhina. Orang miskin tidak memiliki uang, koneksi, pengaruh, kuasa, pengetahuan, keterampilan teknis, kelahiran yang terhormat, kekuatan fisik, kemampuan intelektual, kebebasan pribadi bahkan harkat manusia. Mereka hidup dari hari ke hari dan tidak punya peluang sedikit pun untuk melepaskan diri dari keadaannya tanpa bantuan orang lain. Definisi semacam ini meliputi semua orang yang

tersingkirkan dan dicabut hak-haknya, semua orang aneh dan semua kelompok marginal”.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2004 menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera. Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I. Keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu : a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut. b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. d) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. e)

Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

3. Keluarga Sejahtera II. Keluarga selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan terdiri dari lima indikator pada Keluarga Sejahtera I ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut : a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing. b) Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk. c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir. d) Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m² untuk tiap penghuni rumah. e) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir berada dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. f) Paling kurang satu orang anggota

keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.h) Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah.i) Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS, saat ini mereka memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

4. Keluarga Sejahtera III. Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. Mereka harus memenuhi persyaratan indikator pada Keluarga Sejahtera I dan II serta memenuhi syarat indikator sebagai berikut : a) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.b) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.c) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar-

anggota keluarga.d) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.f) Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.g) Anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi.

5. Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga selain telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat indikator pada Keluarga Sejahtera I sampai III dan ditambah dua syarat berikut :a) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.b) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif

sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

6. Kemiskinan multidimensi mengidentifikasi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan
7. Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan cultural
 - a. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variable eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam
 - b. Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang

tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya

- c. Kemiskinan cultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi

8. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004).

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Dalam penjelasan pasal 33 Uud 1945 ini dikatakan bahwa "produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Menurut Kamus Umum Lengkap karangan wjowasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada 3 kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional yaitu:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 2) Badan Usaha Koperasi (BUK)
- 3) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi.

- (1) sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan
- (2) sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian indonesia, masih berlakukah? Akan tetapi perkembangan koperasi tidak senantiasa semulus apa yang diharapkan dan dibayangkan. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam setiap perkembangannya, harapan

menjadikan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia belum dapat diwujudkan.

Pada prakteknya, banyak koperasi yang setelah berkembang justru kehilangan jiwa koperasinya. Dominasi pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha dan koperasi yang membentuk PT (Perseroan Terbatas) merupakan indikasi kurang-mampuan koperasi mengembangkan usaha dengan tetap mempertahankan prinsip koperasi

Dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat diwarnai oleh peranan dunia usaha, maka mau tidak mau peran dan juga kedudukan koperasi di Indonesia dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh perannya dalam kegiatan usaha (bisnis). Persaingan telah menuntut tersedianya rancangan strategi-strategi dan kiat-kiat tertentu agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang dalam kancah persaingan yang semakin ketat. Hal ini menyatakan bahwa kondisi perkoperasian saat ini cukup sulit dan menghambat kemajuan koperasi di Indonesia.

Adapun salah satu faktor utamanya adalah ketidakmampuan koperasi menjalankan fungsi sebagai mana yang ‘dijanjikan’, serta banyak melakukan penyimpangan atau kegiatan lain yang mengecewakan masyarakat, seperti faktor-faktor berikut ini :

1. Partisipasi Anggota Koperasi

Partisipasi ini erat kaitannya dengan pemahaman anggota koperasi terhadap definisi dan peran koperasi secara menyeluruh dalam arti yang sebenarnya, fakta yang terjadi adalah anggota koperasi tidak menunjukkan partisipasinya baik itu kontributif maupun insentif terhadap koperasi itu sendiri

2. Kurangnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan oleh pengurus kepada para anggota koperasi
3. Kegiatan koperasi yang tidak berkembang membuat sumber modal menjadi terbatas ,dan mengakibatkan kurangnya dukungan serta kontribusi dari para anggota untuk berpartisipasi membuat koperasi. Oleh karena itu, semua masalah berpangkal pada partisipasi anggota dalam mendukung terbentuknya koperasi yang tangguh, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya, serta masyarakat sekitar
4. Sebagian koperasi belum maju karena mengalami masalah dalam hal manajemen dan sumber daya manusia

Menurut pendapat saya pribadi tentu sangat masih berlaku karena sebagai landasan dunia usaha dan bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha serta berperan untuk mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur. Dan koperasi sangat berguna bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat . selain itu untuk mewujudkan hal-hal tersebut dalam menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu UUD sebagai pengganti UUD no 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Dan yang terakhir

“bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru prekonomian nasional.”

Oleh sebab itu implikasi kajian ini menghasilkan suatu model teoritis tentang kinerja kelembagaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara teori oleh karena dapat menggeneralisasi variabel kinerja lembaga koperasi. Model teoritik dalam menunjang kinerja lembaga menunjukkan bahwa sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha, dan kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi indikator dalam membentuk kinerja kelembagaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Dan Implikasi kebijakannya adalah Dinas terkait sebagai pembina senantiasa menyediakan pendampingan dalam

melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelola koperasi demi pelaksanaan tata kelola administrasi dan aktif melakukan bimbingan secara berkesinambungan serta lebih selektif dalam pembentukan dan pemberian bantuan terhadap koperasi, selain itu lebih focus pada pengawasannya.

Bagi pengurus koperasi senantiasa menumbuhkan kerjasama yang baik dan harmonis secara timbal balik perangkat organisasi koperasi (rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan) agar dapat menumbuhkan sinergi yang efektif untuk mengembangkan koperasi dan jika perlu memberi rangsangan kepada anggota berupa peningkatan pelayanan dan pemberian penghargaan bagi anggota yang aktif hadir dalam rapat anggota dan berkontribusi terhadap perkembangan koperasi.

Kinerja Lembaga Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dipengaruhi oleh sehat organisasi, sehat *financial*, sehat usaha dan kompetensi Sumber Daya Manusia. Namun demikian, kajian ini masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang variabel-variabel lain yang dapat membentuk kinerja kelembagaan koperasi, termasuk memasukkan faktor-faktor ekonomi dan variabel lain yang diduga berkontribusi terhadap ukuran

kinerja koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Catatan Penting :

A. Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lainnya

Pada umumnya koperasi dengan perusahaan masing-masing memiliki perbedaan tersendiri dari badan usaha yang lain. Koperasi memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan badan usaha lainnya, antara lain:

1. Dilihat dari tujuannya.

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, sedangkan perusahaan atau organisasi lain pada umumnya memiliki tujuan untuk mencari laba. Hal ini bukan berarti koperasi tidak mengharapkan keuntungan, akan tetapi koperasi lebih mengutamakan pada pelayanan dan kesejahteraan terhadap anggotanya.

2. Dilihat dari modalnya.

Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-cadangan lainnya. Modal koperasi ini juga berasal dari semua anggota koperasi yang kemudian dikelola oleh para anggotanya juga. Sedangkan badan usaha lainnya/perusahaan, pada umumnya

modal berasal dari pimpinan atau pemegang saham atau pemilik usaha tersebut.

3. Dilihat dari laporan keuangan.

Dalam laporan keuangan koperasi, menjelaskan tentang manfaat-manfaat yang akan diterima para anggotanya, antara lain adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan di perusahaan (badan usaha) lainnya tidak ada. Jadi laporan keuangan koperasi disampaikan secara transparan karena anggota koperasi memiliki peran ganda, sebagai produsen sekaligus konsumen.

B. Kelebihan Koperasi Dibandingkan Perusahaan Lainnya

1. Koperasi memperoleh laba demi seluruh anggotanya
Artinya, kelembagaan koperasi dalam seluruh aktivitasnya/usahanya berkewajiban untuk satu tujuan, yakni mensejahterakan anggotanya.
2. Anggota koperasi memiliki 2 (dua) peranan, yakni sebagai produsendan sekaligus menjadi konsumen, artinya anggota koperasi dapat berfungsi sebagai pembuat, pemrakarsa sebuah produk dan sekaligus sebagai pemakai.
3. Prinsip kesukarelaan

Menjadi anggota koperasi tidak ada paksaan bagi anggotanya untuk melakukan segala aktivitasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ARDT) koperasi. Artinya bahwa menjadi anggota koperasi bersifat sukarela dalam keterlibatannya menjadi anggota koperasi

4. Prinsip mementingkan kepentingan anggotanya
Kelembagaan koperasi selalu mementingkan kepentingan anggotanya dan kesejahteraan anggotanya. Artinya semua anggota yang terlibat dalam koperasi tidak berperan sebagai pemilik tunggal dan mencari keuntungan sendiri, akan tetapi kepentingan bersama

C. Fungsi dan Peranan Koperasi Untuk Masyarakat

1. Sebagai urat nadi perekonomian Indonesia
2. Sebagai sarana mendemokratisasikan sosial ekonomi Indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
4. Memperkokoh perekonomian masyarakat Indonesia

D. Ada beberapa Alasan Masyarakat Kurang Memanfaatkan Koperasi

1. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Koperasi

Hal tersebut dapat terjadi jika seseorang pernah menjadi anggota koperasi, akan tetapi pernah mengalami kegagalan pada saat menjadi anggota dan tidak mendapatkan adanya pertanggungjawaban atau transparansi dari pihak koperasi, sehingga menghilangkan kepercayaan pada dirinya dan anggota masyarakat pada umumnya terhadap koperasi itu sendiri.

2. Image Koperasi Sebagai Kelas Ekonomi Nomor Dua

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa koperasi tidak pernah mengalami kemajuan seperti badan usaha lain, dari dulu hingga sekarang koperasi begitu terus adanya. Itulah sebabnya yang membuat masyarakat meragukan akan perkembangan koperasi kedepannya sehingga tidak sedikit masyarakat belum memanfaatkan koperasi tersebut secara optimal. Oleh sebab itu keberadaan mereka hanya sebatas menjadi anggota sebab image masyarakat terhadap koperasi selalu memandang nomor dua dan tidak ada upaya menjadikan nomor satu.

3. Kebanyakan Manajemen Koperasi Belum Professional

Salah satu yang menjadi kendala dalam perkembangan koperasi adalah belum profesionalnya manajemen koperasi dalam mengelola perkembangan dan kemajuan koperasi sebab sumber daya manusia yang mengelola koperasi masih rendah, belum berpengalaman, ditambah lagi tingkat pendidikan yang masih rendah dan amanah yang diberikan untuk mengelola koperasi bukan pada bidangnya/keahliannya sebab prinsip manajemen *“the right man on the right place”* diabaikan, sekiranya orang yang tepat pada tempatnya yang tepat pasti dapat bekerja secara professional.

4. Kurangnya Fasilitas Yang Dapat Menarik Masyarakat

Hal lain yang sangat penting dalam aktivitas koperasi adalah fasilitas. Pada umumnya fasilitas yang ada di koperasi untuk masyarakat atau anggotanya tidak selengkap yang ada di badan-badan usaha lainnya sehingga masyarakat masih kurang tertarik akan hal tersebut.

5. Kurang Dirasakannya Peran Dan Manfaat Koperasi

Peran dan manfaat adanya koperasi belum dapat dirasakan dengan sempurna oleh masyarakat karena koperasi belum mampu meyakinkan masyarakat untuk berkoperasi. Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka Koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya.

Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Harapan satu-satunya adalah berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi atau anggota sebagai pengguna jasa (user), dari fungsi ini anggota berharap dapat memperoleh nilai tambah berupa manfaat ekonomi. Oleh

karena itu mengukur keberhasilan usaha Koperasi diperlukan alat ukur lain, sesuai dengan tujuan Koperasi. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, pasal 3, salah satu tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya.

Keberadaan koperasi bukanlah hal yang baru dalam perekonomian Indonesia, hanya saja image koperasi selalu menjadi nomor 2 (dua) jika dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya. Padahal, koperasi sebenarnya memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan badan usaha lainnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Untuk itu koperasi seharusnya bisa lebih mensosialisasikan berbagai hal mengenai koperasi agar masyarakat mengetahui koperasi lebih dalam, koperasi juga seharusnya bisa menunjukkan tanggung jawab, serta perkembangannya dalam perekonomian Indonesia. Tanpa koperasi menunjukkan itu semua, kepercayaan masyarakat tentu tidak akan pernah ada untuk koperasi. Apabila koperasi dapat menunjukkan peranan pentingnya dalam perekonomian masyarakat, menunjukkan keprofesionalan manajemennya dan sebagainya, tentu kepercayaan masyarakat perlahan akan datang dan masyarakat pun akan mulai untuk turut berpartisipasi dalam koperasi tersebut.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No.25 Tentang Perkoperasian
- _____, 2015. BPS Kabupaten Pangkep Dalam Angka
- _____, 2015. BPS Kabupaten Takalar Dalam Angka
- _____, 2014. BPS Makassar Dalam Angka
- Albert dan Hahnel, 2005. Classical Utilitarian, Neoclassical Welfare Theory Dan New Contractarian Approach:
- Arifin Sitip Halomoan Tamba, 2001, Koperasi, Teori dan Praktek, Jakarta : Erlangga
- AM Yamin 2013. Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Rakorda antara Dinas Koperasi dan UKM Sulsel dengan dinas yang membidangi se-Sulsel, di Hotel Kenari, Rabu (27/11).
- Baumann, P. (2005), *Philosophy of Science*, 72, pp. 231–240.
- Barrett, Pamela Bowen. Penetapan AD & ART merupakan pertanggungjawaban pengurus sebagai cerminan akuntabilitas koperasi.
- Deliar Noer, Mohammad Hatta : Biografi Politik , (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 541

- Dasori, Wuni P. Wilfrid Laurier University (Canada),
ProQuest, UMI Dissertations
- Gagliardi, Francesca, 2009. Pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan koperasi dapat dilihat dari SHU yang dicapai.
- H. Masngudi, 1990. Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia, (Jakarta : Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, 1990), hlm. 4.
- Hari Lubis SB dan Martani Huseini. 1987. Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro. PAU Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta Hamid Basma. 2013. Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinwil) Sulsel. (online 5 Januari 2015)
- Herlina Setiyarini, Wisnu, 2014. Jurnal Pendidikan Sejarah. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953. Volume 2, No. 3, Oktober 2014.
- Herry Yulistiyono, 2007. Evaluasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Bangkalan. Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi Unijoyo. Jurnal (online 10 Januari 2015)
- Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart, 2005. Financing Cooperative: Proving that the Best Financing Solutions are Created Together. Government Review. Publication Governmen Finance Officers Assosiation. ISSN 08837856. Vol.21, Issue 3. Page 30-34
- Hussain, dkk, 2006, "SME financing in the UK and in China: a comparative perspective", *Journal of Small Business and Enterprise Development* Volume: 13.

- Ilham, 2013. **www.pelatihan-sdm.net/...elatihan-dan-pengembangan-sd.** (online 10 Februari 2016)
- Jocheb Ropke, 1997. Perkembangan Jumlah Anggota memberikan kontribusi terhadap peningkatan SHU.
- Jocken Ropke, 2000, *Ekonomi dan Koperasi, teori dan Manajemen (Terjemahan)*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- John E. Mitchell, 2010. *Criteria and Indicators of Sustainable Rangeland Management* University of Wyoming Cooperative Extension Service Publication SM-561. A publication of the Sustainable Rangelands Roundtable (Monograph 1) and the Society for Range Management (Monograph 4). © University of Wyoming and Society for Range Management.
- Kamaruddin Aziz, 2015. *Sekretaris Umum Perkasa 89, Membangun Ekonomi Sulsel, Mungkinkah dengan Koperasi?*. Bekerja sama dengan Tribun Timur dalam Tudang Sipulung.
- Malayu SP Hasibuan. 2001. *Organisasi dan Motivasi Dasar*
- McNamara, Madeleine Wright, (2008). *Old Dominion University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 3338107*
- Moeheriono, 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeheriono, 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasikun, Dr. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.

- North, North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press
- Parsons, Talcott. 1937. "The Structure of Social Action". New York: McGraw-Hill. George Ritzel. 2012. *Teori Sosiologi (dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, Ed.8. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peters, John Edward. University of Southern California, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 2003. 3103958.
- Prawirokusumo, 2001. *Perkembangan profitabilitas usaha, Taraf hidup anggota didasarkan pada perkembangan profitabilitas usaha anggota*.
- Puspayoga (2016). *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Peringatan Hari Koperasi ke-69 18 Juli Tahun 2016*
- Ramudi Arifin, 2010. *Dasar-Dasar Pengukuran Kinerja Koperasi*. Coopetition Vol.I No.1 Maret 2010.
- Rani Puspita Sari. 2013. *Penyebab Koperasi Di Indonesia Sulit Berkembang*.
[https://ranipuspitasari.wordpress.com/.../softskillpenye..\(Online, 2015\)](https://ranipuspitasari.wordpress.com/.../softskillpenye..(Online, 2015))
- Rampalli Prabhakara Raya, (2013). *Sivapragasam Panneerselvam. The healthy organization*
- Rivai, Veithzal, Deddy Mulyadi 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, --ed. 2-9-, Jakarta; Rajawali Pers
- Robbins, Stephen P. 1994. *Organizational Behavior Concepts, Controversies, Applications*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, Jakarta :

- Rummler GA, Brache AP (1995) *Improving performance: How to manage the white space in the organization chart* (2nd ed.). Wiley John & Sons Inc, New York.
- Rusdiana dan Wahyuning, 2009. Kesempatan mengikuti pendidikan Taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga
- Rubach, Michael Joseph, (1997). The University of Nebraska - Lincoln, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 9736949.
- Saudin Sijabat, 2010. Kajian Pengendalian Anggota pada Koperasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Koperasi.
- Shofiatu Rahmah Sugis, 2011. Model Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Menengah Melalui Pengembangan Modal Insani dan Modal Sosial. (online 16 Maret 2015)
- Simeyo Otieno, 2013. An Assessment of Effect of Government Financial Regulations on Financial Performance in Savings and Credit Cooperative Societies (SACCOs): A study of SACCOs in Kisii Central, Kenya Department of Business and Management School of Business and Economics Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology P.O. Box 210 - 40601 Bondo-Kenya,
- Sitio. Arifin, Halomoan Tamba. 2001. Koperasi: Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga
- Subandi, 2013. Ekonomi Koperasi. Cetakan ke 3 Penerbit Alfabeta Bandung
- Syahyuti, 2006. Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional, Jurnal :Pusat

- Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
- Stookey, Sarah. 2010. Ownership, Participation and Commitment Business Renaissance Quarterly 5.3 (Fall): 85-114.
- Tjahjono Widarmanto. 2008. *Enam Puluh Satu Tahun Perjalanan Koperasi: Membangun Koperasi Berkualitas Berbasis Kompetensi SDM*. Edisi 90/68Tahun IX/Juli
- Tony, dkk., 2003. Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri, (WorldForestryCenter)
- Torka, Nicole; Looise, Jan Kees; Zagelmeyer, Stefan, 2011. Ordinary Atypical Workers, Participation within the Firm and Innovation: A Theoretical Endeavor and Empirical Outlook.
- Torka, at.al. 2011. Ordinary Atypical Workers, Participation within the Firm and Innovation: A Theoretical Endeavor and Empirical Outlook.
- Tri Budiarto. 2013. Menuju Kelembagaan Koperasi yang Gemilang. *ekonomi.kompasiana.com/.../menuju-kelembagaan-ko (on line, 2015)*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Departemen Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Victor P.H. Nikijuluw, (2003). Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Widarmanto, T. 2008. Enam Puluh Satu Tahun Membangun Koperasi: Membangun Koperasi Berkualitas Berbasis Kompetensi SDM. Gemari, Edisi 90, Tahun IX Juli. hlm.68-69.

- Yona Perwitasari, Sri Witurachmi, Elvia Ivada 2013. Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, KIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, 57126, Indonesia yona_perwitasari@yahoo.com
- Yuditriasnanto, 2011. Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Konsep Sustainable Asset Management dan Prinsip Ekonomi Kerakyatan. prezi.com/.../perkembangan-konsep-sustainable-d (on line, 2017)
- Zurnali, Cut (2010). Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, dan Customer Orientation : Knowledge Worker-Kerangka Riset Manajemen Sumberdaya Manusia di Masa Depan. *Jurnal* (online, 11 Februari 2017)
- _____, Konsep Sustainable Development. (online 13 Desember 2017)
- _____, <http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasidan>
<http://bumnwatch.com/peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia/>. (on line 25 Desember, 2017)
- _____, Komitmen organisasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. id.wikipedia.org/wiki/Komitmen_organisasi. (online 10 Desember 2017)
- _____, 2014. teorionline.wordpress.com/2010/02/04/komitmen-organisasi. (online, 10 Desember 2017)
- <http://fani4.wordpress.com/2011/10/29/koperasi-sebagai-sokoguru-perekonomian-indonesia/>
- <http://koperasiida.blogspot.com/2012/12/apakah-koperasi-di-indonesia-sudah.html?m=1>